Digital Repository Universitas Jember

DISKRIMINASI ETNIS ROHINGYA OLEH PEMERINTAH MYANMAR

DISCRIMINATION AGAINST ETHNIC ROHINGYA BY GOVERNMENT OF MYANMAR

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

VIDYA TAMA SAPUTRA
NIM 050910101033

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2010

Digital Repository Universitas Jember

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1.) Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2.) Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini;
3.) Pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan secara keseluruhan, penulis sampaikan terima kasih atas dukungannya.

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

“Jadilah Orang Baik”

Digital Repository Universitas Jember

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Vidya Tama Saputra

NIM : 050910101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

" Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintah Myanmar" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2010

Yang menyatakan

Nama : Vidya Tama Saputra

NIM : 050910101033

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Diskriminasi Etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Senin, 28 Juni 2010

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Tim Penguji

Ketua : Drs. Supriyadi, M.Si ( )
NIP 195803171985031003

Sekretaris I : Drs. A. Eby Hara, M.A, Ph.D ( )
NIP 196402081989021001

Sekretaris II : Drs. Sugiyanto E.K, M.A, Ph.D ( )
NIP 195004281979031001

Anggota :

1.) Heri Alfian, S.Sos, M.Si ( )
NIP 198008222005011001

2.) Drs. Agung Purwanto, M.Si ( )
NIP 196810221993031002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP 195207271981031003

Digital Repository Universitas Jember

ABSTRAK

Setiap manusia memiliki hak untuk dapat hidup sejajar dengan manusia lainnya, tanpa melihat dari mana dia berasal, ras, agama atau jenis kelamin. Keadaan tersebut telah terjamin dalam konstitusi setiap negara, bahkan untuk level di atas negara sekalipun seperti organisasi internasional, terdapat beberapa peraturan yang memberikan jaminan perlakuan setiap manusia secara sejajar seiring dengan semakin majunya peradaban hidup manusia. Tetapi meskipun kondisi saat ini telah menunjukkan perkembangan cukup pesat peradaban hidup manusia, hal itu tidaklah menjamin bahwa setiap negara di dunia ini memberi perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia secara utuh, bahkan tidak jarang suatu negara secara sengaja menerapkan berbagai kebijakan untuk mempersulit kehidupan warganya disebabkan bermacam alasan. Keadaan inilah yang terjadi pada warga etnis Rohingya di Myanmar, selama bertahun-tahun mereka mengalami perlakuan diskriminatif dari pemerintah setempat bahkan saking sewenangnya tindakan pemerintah setempat dan telah berlangsung cukup lama, keberadaan warga etnis Rohingya di negara bagian Arakan, kini terancam. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sebenarnya faktor penyebab terjadi tindakan diskriminatif tersebut. Jika melihat secara lebih teliti, maka didapat fakta bahwa pemerintah yang melaksanakan kebijakan diskriminatif terhadap etnis Rohingya didorong oleh tiga faktor yaitu: faktor sejarah, faktor politik, faktor ekonomi. Faktor sejarah adalah keinginan untuk membalas kekecewaan pada masa penjajahan Inggris dan ini dilampiaskan melalui pemberlakuan tindakan diskriminatif terhadap etnis Rohingya. Faktor politik adalah keinginan kelompok militer mempertahankan dominasinya, faktor ekonomi adalah keinginan kelompok militer menguasai ladang gas alam dan situs Buddha *Mahamuni* di wilayah Arakan.

Kata kunci: *diskriminasi, etnis Rohingya,*

Digital Repository Universitas Jember

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan atas rahmat Allah SWT karena atas kuasaNya akhirnya karya tulis ilmiah (skripsi) berjudul "Diskriminasi Etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar" terselesaikan juga. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis juga berharap semoga dengan ditulisnya skripsi ini dapat menambah wawasan tidak hanya bagi penulis, tetapi juga kepada para pembacanya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1.) Bapak Prof. Dr. Hari Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2.) Bapak Drs. Supriyadi M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Drs. Joko Soesilo M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3.) Bapak Dr. A. Eby Hara M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I;
4.) Bapak Dr. Sugiyanto E.K. M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II;
5.) Bapak Honest Dody M. S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6.) Bapak Heri Alfian S.Sos., M.Si., terima kasih atas kesediaannya memberikan banyak masukan;
7.) Kepada guru-guru dari TK sampai Perguruan Tinggi terima kasih atas didikannya;
8.) Kepada keluarga, penulis sampaikan terimakasih atas do'a dan dukungannya;
9.) Kepada teman-teman di HI 05, UKM Tenis lapangan FISIP, SIKLUS, JAC, relawan dan pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan secara keseluruhan, penulis sampaikan terima kasih atas kesediaannya berbagi selama ini.

Digital Repository Universitas Jember

Akhirnya, penulis turut mengharap koreksi dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini bermanfaat.

Jember, 01 Oktober 2009

Penulis

Vidya tama saputra

050910101033

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSEMBAHAN..... ii
HALAMAN MOTTO..... iii
HALAMAN PERNYATAAN..... iv
HALAMAN PENGESAHAN..... v
ABSTRAK..... vi
PRAKATA..... vii
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TABEL..... xi
DAFTAR DIAGRAM..... xii
DAFTAR LAMPIRAN..... xiii
BAB 1. PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan..... 8
1.2.1 Batasan Materi..... 9
1.2.2 Batasan Waktu..... 9
1.3 Perumusan Masalah..... 9
1.4 Kerangka Pemikiran..... 10
1.5 Argumen Utama..... 15
1.6 Metode Penelitian..... 16
1.6.1 Metode Pengumpulan Data..... 16
1.6.2 Metode Analisa Data..... 17
1.7 Pendekatan...... 17
BAB 2. GAMBARAN UMUM MYANMAR DAN ETNIS ROHINGYA 18
2.1 Gambaran Umum Myanmar..... 18
2.1 1 Kondisi Geografis..... 18

Digital Repository Universitas Jember

2.1.2 Pemerintahan Militer Myanmar..... 20
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya..... 29
2.1.4 Kondisi Perekonomian..... 32
2.1.5 Bidang Pendidikan..... 35
2.2 Gambaran Umum Etnis Rohingya..... 36
BAB 3. BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS ROHINGYA 48
3.1 Bentuk Diskriminasi Terhadap Etnis Rohingya..... 48
3.1.1 Diskriminasi Bidang Politik..... 50
3.1.2 Diskriminasi Bidang Pendidikan..... 54
3.1.3 Diskriminasi Bidang Ekonomi..... 55
3.1.4 Diskriminasi Bidang Sosial Budaya..... 61
3.2 Kasus Tindakan Diskriminasi Terhadap Etnis Rohingya.... 66
BAB 4. FAKTOR PENYEBAB DISKRIMINASI ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR..... 69
4.1 Faktor Sejarah..... 69
4.2 Faktor Politik..... 73
4.3 Faktor Ekonomi..... 76
BAB 5. KESIMPULAN..... 80
DAFTAR BACAAN..... 82
LAMPIRAN..... 94

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Data Tentang Persentase Anggaran Belanja Militer dari APBN Negara-Negara di ASEAN..... 26
2. Komposisi Etnis di Myanmar…….. 30
3. Daftar Etnis yang Diakui oleh Pemerintah Junta……..... 31
4. Data Tentang Jumlah Populasi Etnis Rohingya di Luar Negeri (terhitung sejak Mei 2007)..... 46
5. Populasi Etnis Rohingya di Wilayah Arakan (Myanmar)..... 46
6. Kondisi Pendidikan di Wilayah Arakan……..... 55
7. Contoh Peristiwa Penghancuran Tempat Ibadah Etnis Rohingya……. 61
8. Kasus Tindakan Sewenang-wenang pemerintah terhadap etnis Rohingya..... 66

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

1. Jumlah Etnis Rohingya yang Meninggalkan Myanmar Dengan Perahu..... 44
2. Faktor Penyebab Diskriminasi Etnis Rohingya..... 69

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. The Panglong Agreement 1947..... 94
2. Peta Negara Myanmar..... 97

Digital Repository Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan rasa aman seperti menjadi salah satu hal yang harus terpenuhi selain kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan rasa aman tersebut manusia berupaya, salah satunya dengan cara mempertegas keberadaannya agar diakui sehingga mendapatkan perlindungan yang pantas dari negara tempat dia berada. Permasalahan kemudian muncul pada saat keberadaan suatu individu atau kelompok indvidu itu tidak diakui oleh pemerintah dengan berbagai alasan, akibatnya kebutuhan akan rasa aman sulit terpenuhi karena pemerintah setempat secara sengaja melepaskan tanggung jawab dengan mengabaikan kewajibannya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap individu atau kelompok individu tersebut. Keadaan menjadi lebih rumit jika pemerintah setempat tidak hanya menolak memberikan pengakuan tetapi juga memiliki inisiatif melakukan berbagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengancam keberadaan suatu individu atau sekelompok individu.

Keadaan seperti tersebut di atas juga dialami oleh sekelompok etnis minoritas di Myanmar yaitu etnis Rohingya. Etnis Rohingya adalah penduduk Muslim asli negara bagian Arakan, merupakan keturunan dari campuran orang Bengali, Persia, Mongol, Turki, Melayu, Arab dan menjadi penduduk minoritas di Arakan. Setelah kemerdekaan Burma (Myanmar) populasi etnis Rohingya terus berusaha dikurangi, melalui beberapa tindakan mulai dari pengusiran hingga pembunuhan, sampai saat ini hanya tersisa sedikit etnis Muslim Rohingya di Arakan, karena populasi etnis Rohingya terpojok di bagian utara Arakan[1]. Terdapat dua pendapat berbeda terkait dengan sejarah keberadaan etnis Rohingya di negara bagian Arakan. Pertama datang dari kelompok Buddha Rakhine yang berpendapat bahwa keberadaan etnis Rohingya

[1] http://ji-indonesia.com/pipermail/an-nuur_ji-indonesia,com/2009-February/001364.html diakses pada 03 Februari 2009

Digital Repository Universitas Jember

dimulai sejak kedatangannya di negara bagian Arakan bersama pasukan dari Kerajaan Inggris pada abad 19 dan 20. Nama "Rohingya" kemudian dibuat oleh kelompok Muslim Bengali agar mereka bisa mendapatkan status sebagai salah satu etnis asli Burma seperti status yang telah diberikan pada etnis Shan, Karen, Kachin dll. Dengan diperolehnya status sebagai etnis asli Burma, maka dapat memungkinkan mereka untuk mengklaim bahwa negara bagian Arakan adalah wilayah asal mereka dan membangun suatu wilayah yang diperuntukkan hanya bagi orang Muslim Rohingya. Kenyataan tersebut diperkuat dengan suatu fakta bahwa pada 1942 pernah terjadi peristiwa pembunuhan massal, dan pergerakan *Mujaheed* pada tahun 1947 yang menuntut otonomi khusus bahkan tidak jarang diikuti dengan usaha penggabungan (anexasi) negara bagian Arakan dengan Pakistan timur (Bangladesh).

Sedangkan kelompok Muslim Rohingya berpendapat bahwa keberadaan mereka di negara bagian Arakan diperkirakan dimulai sejak berdirinya Kerajaan Islam yang pernah menguasai wilayah Arakan pada 1430[2] dan telah berkuasa selama bertahun-tahun. Kerajaan Islam itu sendiri sebenarnya masih mendapatkan pengaruh ajaran Buddha dengan pengikutnya sebagian besar merupakan keturunan indo-aria.

Pengaruh Islam mulai menguat di wilayah Arakan setelah masuknya para pedagang dari Arab pada abad ke-17 yang saat itu Kerajaan berada di bawah kekuasaan dinasti Mrauk Oo. Selanjutnya dapat dipastikan pengaruh Islam berhasil sedikit demi sedikit menggeser pengaruh Buddha karena penyebaran pengaruh Islam dilakukan dengan sederhana dan memanfaatkan pendekatan budaya seperti melalui pernikahan antar keturunan, kegiatan perdagangan dll. Perbedaan pandang ini mengakibatkan hubungan antara kedua kelompok dalam wilayah Arakan yaitu etnis Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine (Rakhaing) tidak harmonis karena kelompok Buddha Rakhine menganggap bahwa wilayah Arakan adalah warisan dari Sang Buddha, sedangkan kelompok Muslim Rohingya yakin bahwa di zaman dahulu

[2] Arakan Rohingya National Organization, NCGUB pushing the Rohingya from the frying-pan into the fire, 13 Februari 2009

Digital Repository Universitas Jember

terdapat Kerajaan Islam dan pernah menguasai wilayah ini dalam jangka waktu cukup lama. Kerajaan Islam dimaksud oleh etnis Rohingya adalah *Din-nya-waddy,* menurut etnis Rohingya Muslim, Kerajaan ini telah berdiri sekitar tahun 146 masehi[3] terletak di sekitar teluk Bengal. Kerajaan ini secara alami memiliki keterkaitan erat dengan etnis di anak benua Asia (India) dari pada etnis-etnis di Myanmar. Keadaan seperti ini didukung dengan kondisi alam yang mana wilayah Kerajaan Islam *Din-nya-waddy* dipisahkan oleh rangkaian pegunungan Arakan Yoma membuatnya menempati wilayah cukup berbeda. Pada masa ini wilayah Arakan menjadi wilayah perebutan pengaruh antara Budaya Buddha, Muslim dan Hindu. Pada tahun 1440, Raja Narameikhla beserta pengikutnya dari Kerajaan Islam dipaksa untuk mencari perlindungan di Bengali setelah invasi Kerajaan Burma di bawah Raja Boddawpaya. Raja Narameikhla lalu diterima dengan baik oleh Sultan Jalaluddin Muhammad Shah, Beliau merupakan Sultan Gaur (ibu kota Bengali) yang kemudian turut membantu memperbaiki kekuasaan Raja Narameikhla.

Pada abad 16 beberapa perompak asing terutama dari Portugis datang dan berhasil mengalahkan kekuasaan Kerajaan Burma lalu membuat wilayah Arakan menjadi wilayah tanpa penguasa. Setelah itu mulailah berdatangan pedagang-pedagang dari Perancis, Inggris, Belanda di mana kehadiran mereka tidak hanya ingin berdagang beberapa komoditas rempah, tetapi juga tertarik untuk membeli budak dari wilayah Asia Tenggara dan termasuk di dalamnya adalah budak dari Burma. Kehadiran para pedagang ini membuat wilayah Arakan semakin anarkis setelah sebelumnya akibat dari kehadiran perompak Portugis, wilayah ini menjadi tanpa penguasa. Pada 1784 Raja Boddawpaya dari Burma berhasil mengambil alih kekuasaan atas wilayah Arakan dan menjadikan Arakan sebagai provinsi dari Kerajaan Burma. Pada 1826 setelah perang *Anglo-Burman* pertama terjadi, wilayah Arakan termasuk Burma dan Tenasserim diserahkan pada penjajah Inggris melalui pengesahan perjanjian *Yandabo*, bersama ini pula banyak orang dari British-India

[3] G.E Harvey ."History of Burma" Frank Cass & Co. Ltd , London, 1925 and 1967

Digital Repository Universitas Jember

termasuk di dalamnya etnis Rohingya dibawa ke wilayah Arakan untuk dijadikan pekerja atau pegawai pada pemerintahan koloni Inggris. Lalu dengan *Government of India Act* tahun 1935 diputuskan bahwa Burma terpisah dari British-India tepatnya berlaku mulai tanggal 1 April 1937. Melalui keputusan ini pula digabungkanlah Arakan menjadi bagian British-Burma, bertentangan dengan keinginan penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India, hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma merdeka pada tahun 1948[4].

Setelah Burma bersatu mencapai kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1948, para biksu dari Arakan bersama kelompok intelektual termasuk di dalamnya mantan Perdana Menteri Burma di bawah penjajahan Inggris Sir Paw Tun, mulai meminta pengakuan terhadap sejarah latar belakang wilayah Arakan dan mendukung upaya pembentukan negara bagian Arakan. Di lain pihak, perwakilan dari kelompok Muslim Arakan (yang pada saat itu telah mempersiapkan nama "Rohingya" sebagai identitas kolektif mereka, tetapi nama tersebut masih belum resmi digunakan) secara kuat menolak tuntutan tersebut. Alasan penolakan tersebut karena menurut mereka jika tuntutan itu dipenuhi maka praktis kelompok Buddha Rakhine akan menguasai seluruh wilayah Arakan. Lalu pada tahun 1961, PM U Nu akhirnya memutuskan untuk mendirikan negara bagian Arakan dengan daerah Mayu yang terdiri atas Buthidaung, Maungdaw dan Rathedaung sebagai daerah terpisah dari negara bagian Arakan. Ditetapkannya daerah Mayu sebagai daerah terpisah, karena pemerintah pusat tetap ingin mempertahankan dukungan dari kelompok Muslim. Namun status otonomi tidak diberikan pada negara bagian Arakan agar dapat mempertahankan kendali pemerintah pusat atas wilayah ini. Setelah melalui proses pertimbangan yang cukup lama, akhirnya kelompok Muslim atas nama *Mayu Frontier Administration* bersedia menerima kebijakan dari pemerintah tersebut[5]. Kebijakan ini diteruskan sampai pada pemerintahan di bawah kekuasaan Jenderal Ne Win.

---

[4] Ebo Briefing Paper NO.2 2009/The Rohingya's : Bengali Muslims or Arakan Rohingyas?
[5] Yegar, 2002: 49-51

Digital Repository Universitas Jember

Arakan sendiri merupakan sebuah negara bagian seluas 14.200 mil^2 terletak di barat Myanmar, merupakan daerah pesisir timur teluk Bengali yang bergunung-gunung. Daerah itu berbatasan langsung dengan India di utara, negara bagian Chin di timur laut, distrik Magwe dan Pegu di Timur, distrik Irrawady di selatan dan Bangladesh di barat laut. Saat ini dihuni oleh sekitar 5 juta penduduk yang terdiri dari etnis Rohingya dan Rakhine/Maghs yang beragama Buddha termasuk etnis Kaein, Kwemyi, Daingnet, Maramagyi, Mro, Thet. Sebagai etnis minoritas, posisi etnis Rohingya dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang pemerintah Myanmar jelas tidak bisa melakukan banyak hal terkait dengan upaya pembelaan akan keberadaan mereka. Apalagi pemerintah Myanmar sudah terbiasa menggunakan kekuatan militernya dalam mendukung kebijakan represif yang bertujuan menekan keberadaan etnis Rohingya sehingga akhirnya orang-orang dari etnis Rohingya memilih melarikan diri ke luar wilayah/negara dengan harapan mereka akan mendapatkan pengakuan dan keamanan yang lebih terjamin.

Orang-orang dari etnis Rohingya tersebut melarikan diri ke negara-negara terdekat seperti Thailand, Bangladesh atau Malaysia, tetapi dalam upaya mereka melarikan diri ke luar negeri tidak selamanya berjalan baik, sering mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanannya mencapai negara tujuan bahkan mengakibatkan jatuh korban jiwa karena perlengkapan maupun sarana transportasi yang mereka manfaatkan dalam hal ini adalah perahu untuk melintasi lautan luas kurang memadai[6].

Seperti yang terjadi pada 7 Januari 2009[7], terdapat beberapa orang terdampar di wilayah perairan Aceh tepatnya di Sabang. Tercatat bahwa sebenarnya terdapat sebanyak 220 orang dalam perahu tersebut, namun yang bisa selamat hanya 198 orang sedangkan 22 orang lainnya meninggal dunia saat berada di atas kapal[8]. Diperkirakan ke 198 orang tersebut merupakan suku Rohingya yaitu etnis minoritas

[6] Kaladan News (26 Januari 2008) BDR pushes back 19-Burmese national to Burma
[7] www.bbcindonesia.com,di akses pada 11 Februari 2009
[8] www.okezone.com/Nasib warga Myanmar yang terdampar belum ditentukan/text size/ diakses pada 6 Februari 2009

Digital Repository Universitas Jember

Muslim di Myanmar pelarian korban kekejaman rezim militer Myanmar dan termasuk di dalamnya adalah orang Bangladesh. Mereka ditemukan oleh nelayan setempat dan pasukan Angkatan Laut Indonesia. Sebenarnya para pelarian tersebut yang juga disebut-sebut sebagai "manusia perahu" tidak hanya terdampar di wilayah perairan Indonesia saja tetapi juga di wilayah perairan Thailand dan India.

Menurut aparat setempat, mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan "Kondisi mereka sudah banyak yang sakit, ada yang kritis karena sudah 22 hari di laut, "Sekitar 50 di antaranya kini dirawat di rumah sakit karena menderita dehidrasi yang parah ungkap Komandan Pos Angkatan Laut Satuan Radar Idi Rayek, di Aceh Timur, Letnan Dua Tedi Sutardi,[9] dan untuk sementara mereka dirawat di rumah sakit terlebih dulu sebelum nantinya diwawancarai guna mendapatkan informasi lebih lengkap tentang identitas mereka.

Sebenarnya fenomena perpindahan massal atau eksodus etnis Rohingya tidak hanya terjadi baru-baru ini. Terdamparnya sejumlah orang Rohingya dalam jumlah besar di wilayah provinsi NAD tidak lebih merupakan suatu fenomena gunung es yang telah terjadi untuk waktu relatif lama dan jika dibiarkan akan menggelinding semakin cepat sekaligus membawa akibat cukup kompleks. Tercatat bahwa pada awal tahun 1990an sejumlah orang Rohingya meninggalkan Myanmar menuju Bangladesh[10]. Fenomena eksodus etnis meninggalkan negara Myanmar tidak hanya terjadi pada etnis Rohingya saja, tetapi juga etnis lainnya seperti etnis Chin yang pernah meninggalkan negaranya karena bencana kelaparan. Sebagai contoh pada Juli 2008 dilaporkan bahwa telah terjadi perpindahan orang-orang Myanmar menuju Mizoram (India) disebabkan kurangnya suplai makanan di negara bagian Chin[11], etnis lainnya seperti etnis Karen meninggalkan Myanmar karena makin represifnya tindakan aparat militer, tercatat antara Februari sampai Juli 2008 penduduk desa

[9] www.bbcindonesia.com/angelina jollie bela warga rohingya/text size/diakses pada 10 Februari 2009
[10] Rohingya Asylum Seekers and Migrants from Burma : a Human Security Priority for ASEAN BN 2009 / 1049 :January 30, 2009,Updated February 16,2009,ALTSEAN Burma
[11] Irrawaddy (04 April 2007) More Rohingya Boat People Detained in Thai Waters

Digital Repository Universitas Jember

Karen tiba di perbatasan Thailand dan Burma[12] termasuk pada saat terjadinya bencana topan nargis mengakibatkan banyak warga Myanmar dari berbagai etnis berupaya mencari tempat lebih baik terutama tempat terdekat dengan Myanmar.

Berdasarkan informasi sementara didapat keterangan bahwa para pengungsi tersebut meninggalkan negara asal mereka karena penindasan dan kemiskinan[13]. Penindasan yang mereka alami berupa perlakukan buruk dari rezim militer Myanmar. Di negara asalnya, orang-orang Rohingya tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Pemerintah setempat hanya membatasi profesi mereka pada pekerjaan rendahan seperti petani, nelayan, penebang kayu.

Bahkan dalam sebuah pernyataanya, rezim militer Myanmar tidak hanya menolak mengakui suku Rohingya sebagai salah satu dari ratusan suku resmi di negara itu, tetapi juga memberikan predikat buruk kepada warga etnis Rohingya[14] seperti pernah dilakukan perwakilan Myanmar di Taiwan yang menyebutkan orang Rohingya seperti monster berkulit gelap. Suku Rohingya sebenarnya adalah kelompok etnis minoritas dari provinsi Arakan di barat laut Burma dekat perbatasan dengan Bangladesh, namun mereka tidak diakui pemerintah Burma sebagai warga negara dan sejak bertahun-tahun mengalami pengejaran. Mereka adalah warga Muslim dan tampaknya ingin menuju Malaysia, di mana sudah lebih dari 20.000 warga Rohingya tinggal di sana. Setiap tahun antara bulan Desember dan Februari, jumlah pengungsi perahu dari Burma meningkat drastis. Karena pada periode tersebut Laut Andaman cukup tenang. Sekitar 600.000 warga Rohingya tinggal di kawasan pedalaman Myanmar dalam kondisi yang buruk, dan sebagian besar lainnya dilaporkan mengungsi ke negara-negara tetangga, seperti Bangladesh dan Malaysia bahkan ke Pakistan atau Arab Saudi[15]. Masih berlangsungnya praktek diskriminasi

---

[12] CHRO (Juli 2008) Food Scarcity and Hunger in Burma's Chin State
[13] www.kompas.com/sabtu 07.00 WIB/ diakses pada 31 Januari 2009
[14] Daily Star (13 Februari 2009), Myanmar Envoy Brands Rohingya's "ugli as ogres" ; Mizzina (13 Februari 2009) Burmese Consular Says Rohingya don't Belong to Birma
[15] www.okezone.com/Etnis rohingnya,Indonesia harus libatkan UNHCR/Textsize/Muhammad Riza/diakses pada 2 Februari 2009

Digital Repository Universitas Jember

etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar hingga saat ini, jika dilihat secara lebih mendalam maka didorong oleh beberapa alasan atau faktor. Pertama berakar dari alasan sejarah yaitu keinginan membalas kekecewaan di masa penjajahan Inggris. Seperti diketahui bahwa bangsa Myanmar memiliki pengalaman kurang menyenangkan pada masa penjajahan Inggris, sehingga ada upaya membalasnya dan hal ini ditujukan pada pihak-pihak yang dianggap dekat dengan koloni Inggris termasuk di dalamnya adalah etnis Rohingya.

Selain itu pemerintah junta masih memandang curiga keberadaan etnis Rohingya, junta beranggapan bahwa masih terdapat peluang/kemungkinan etnis Rohingya akan memberontak mengingat dahulu etnis Rohinya pernah menguasai wilayah Arakan sehingga junta menerapkan berbagai tindak diskriminasi untuk menekan keberadaan etnis Rohingya dan menutup peluang terjadi pemberontakan. terakhir, yaitu keinginan pemerintah junta menguasai ladang gas dan situs Buddha *Mahamuni*

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan ruang lingkup pembahasan merupakan hal penting dalam penulisan karya ilmiah yang dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas dalam analisa permasalahan secara seksama terarah dan sistematis dalam kurun waktu tertentu. Selain itu pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari kekaburan arti dan pembahasan yang terlalu luas atau mengambang sehingga mengurangi bobot ilmiah suatu penulisan. Kartini kartono memberikan penjelasan lain tentang hal ini yang dirumuskan sebagai berikut:

“Pembatasan masalah amat berkaitan dengan batasan waktu peringkasan sempitnya waktu, terbatasnya tenaga dan kemampuan intelektual guna menyelidiki semua interrelasi permasalahan”.

Berdasar tujuan di atas, maka batasan dalam karya tulis ini dibagi menjadi:

1. Batasan materi;
2. Batasan waktu.

Digital Repository Universitas Jember

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi yang dipakai penulis dalam penulisan karya tulis ini adalah pada bahasan tentang tindakan diskriminasi Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Dalam memberikan penjelasan tentang mengapa terjadi tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya, penulis juga menambahkan penjelasan tentang bagaimana bentuk tindakan diskriminasi yang dialami oleh warga etnis Rohingya.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dimulai sejak kemerdekaan Myanmar pada 1948 sampai tahun 1990. Dipilihnya jangka waktu tersebut karena pemerintah Myanmar sebagai pelaku tindak diskriminasi, resmi terbentuk pada tahun 1948 sampai tahun 1990 karena pada saat itu terjadi pelarian dalam jumlah besar warga Rohingya ke Bangladesh akibat dari semakin represifnya tindakan pemerintah setempat.

1.3 Perumusan Masalah

Permasalahan adalah suatu hal yang penting dan harus diperhatikan dalam setiap penulisan karena dengan mengetahui permasalahan akan memberikan kita arah di dalam setiap penelitian dan akan memudahkan pemusatan suatu topik permasalahan pada sebuah penulisan karya ilmiah serta membuat kita mampu untuk mencari dan menyarankan suatu penyelesaian dalam setiap masalah yang dihadapi dan berusaha kita pecahkan.

Menurut The Liang Gie pengertian masalah adalah:

“Kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih mendalam, masalah berhubungan dengan ilmu. Ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya”

Digital Repository Universitas Jember

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penulis mengajukan permasalahan berikut : **"Mengapa pemerintah Myanmar melaksanakan tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya?"**

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran sangatlah diperlukan dalam setiap penelitian ilmiah. Kerangka dasar pemikiran adalah landasan berpijak dalam pemikiran mengenai isu atau pendapat dengan menggunakan teori-teori atau konsep untuk memecahkan dan menganalisa masalah. Kerangka dasar pemikiran dipakai sebagai jembatan antara permasalahan dengan argumen yang diajukan penulis. Dalam bahasan ini penulis menggunakan konsep ethnonasional, teori diskriminasi, konsep etnis. Dipilihnya konsep ethnonasional, teori diskriminasi, konsep etnis karena ketiganya mampu memberikan landasan bagi penjelasan permasalahan yang dibahas.

1.4.1 Konsep Ethnonasional

Ethnonasional sendiri diartikan sebagai:

> *"ethnonationalist are relatively large and regionally concentrated ethnic groups that live within the boundaries of one state or of several adjacent states;their modern political movement are directed toward achieving greater autonomy or independent statehood*[16]*"*

Menurut penjelasan tersebut, maka konsep ethnonasional diartikan sebagai sekelompok orang dalam jumlah besar dan tinggal secara terpusat di suatu wilayah khususnya di wilayah perbatasan negara. Pergerakan politiknya diarahkan pada upaya pencapaian otonomi lebih besar bahkan mendapatkan kemerdekaan. Pernah mengalami kejayaan pada masa lalu dan hal ini sering dijadikan alasan untuk menuntut otonomi atau merdeka terlepas dari kenyataannya apakah kelompok ethnonasionalis memiliki kekuatan sebanding dengan negara induk atau tidak.

---

[16]Gurr, T. R. *Ethnic Conflict in World Politics*. University of Mary Land at College Park, Barbara. H, US Naval Academy, West View Press Bolder Sanfransisco Oxford.

Digital Repository Universitas Jember

Melihat pada ciri-ciri disebutkan di atas, maka warga etnis Rohingya dapat dikelompokkan sebagai ethnonasionalis karena mereka menghuni suatu wilayah secara terpusat tepatnya di negara bagian Arakan wilayah utara, mereka juga menghuni wilayah perbatasan negara tepatnya perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh. Sejarah keberadaan etnis Rohingya juga ditandai dengan adanya kejayaan masa lalu, tepatnya sebelum Myanmar mendapatkan kemerdekaan dari penjajah Inggris. Terdapat Kerajaan Islam (*Din Nya Waddy*) berdiri sejak 146 masehi, mampu bertahan cukup lama bahkan sempat menguasai wilayah Arakan pada 1430. Tetapi, raja beserta pengikutnya terpaksa mencari perlindungan di Bengali paska invasi kerajaan Burma di bawah pimpinan Raja Boddawpaya tahun 1440 mengakibatkan warga etnis Rohingya tidak tersisa sama sekali. Etnis Rohingya juga pernah melaksanakan pergerakan dengan membawa tuntutan pada pemerintah agar wilayah Arakan hanya diperuntukkan bagi etnis Muslim Rohingya meskipun pergerakan tersebut akhirnya dapat dikendalikan oleh pemerintah.

1.4.2 Teori Diskriminasi

Diskriminasi sendiri diartikan sebagai:

> "*any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour descent national or ethnic or origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise on an equal footing of human rights and fundamental freedoms in the politic, economic, social, culture or any other field of public life*[17]"

Menurut penjelasan tersebut, maka dapat diartikan bahwa tindakan diskriminasi yaitu suatu bentuk pemilihan, pembedaan berdasar ras, warna kulit atau keturunan ethnik yang memiliki tujuan atau dampak terhadap pengurangan atau penghapusan pengakuan keberadaan suatu etnis, dan atau suatu etnis diperlakukan secara tidak sama (*unequal)* di bidang politik, sosial, budaya atau bidang kehidupan

[17] UN 1965, article 1, *macro racial discrimination : theories, facts and policy*, Desember 2003 dalam http://goliath.ecnext.com/com2/summary_0199_1334_ITM

Digital Repository Universitas Jember

lainnya. Tindakan diskriminasi dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap warga etnis Rohingya mencakup beberapa bentuk tindak diskriminasi di beberapa bidang kehidupan manusia yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya bahkan tindak diskriminasi oleh pemerintah Myanmar telah mengarah pada upaya pengurangan jumlah populasi etnis Rohingya yang berada di wilayah utara negara bagian Arakan.

Pada awalnya praktek diskriminasi hanya didasarkan pada ciri fisik-biologis atau didasarkan pada superioritas ras tertentu dan diterapkan pada bidang tertentu saja, tetapi sampai pada saat ini praktek diskriminasi telah merambah pada bidang sosial budaya, seperti pembatasan kesempatan untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, upaya penyeragaman budaya/pembentukan identitas bersama berdasar pada satu etnis mayoritas sehingga berdampak pada hilangya identitas / budaya masing-masing yang sebelumnya telah dijaga sebagai warisan dari nenek moyangnya dan menjadi kebanggaan. Michele Lamount turut menjelaskan tentang diskriminasi rasial, yaitu :

> *"Proponent of the theories of a new racism (Barker 1981) and a differential racism (taguieff,1988) suggest that if the last 20 years, racist have come to justify their racism not by biological determinism but by their right to defend the distinctiveness of their culture, stressing the legitimacy of wanting to live with your own kind and maintaining cultural distance between groups*[18].

Dari penjelasan di atas dapat pula disebutkan bahwa pada saat ini praktek diskriminasi didasarkan tidak hanya pada faktor-faktor biologis saja, bahkan telah diperluas ke bidang sosial budaya seperti pembatasan hak terhadap upaya mempertahankan identitas budaya yang berbeda dan berupaya untuk berkumpul dengan kelompok etnisnya. Selanjutnya Rebecca M. Blank, Marylin Dabbady, Constance F. Citro menyebutkan bahwa dalam tindak diskriminasi mengandung 2 komponen :

---

[18] "*The Rhetorics of Racism and anti Racism in France and the US*, Maret 1997 Russel Sage Foundation and Princeton University, Departemen of Sociology, http://www.russelsage.org/publication/working papers/ diakses pada 06 Maret 2009

Digital Repository Universitas Jember

1.) Diskriminasi Rasial, adalah perlakuan berbeda berdasar ras yang akhirnya merugikan kelompok ras tertentu/kelompok di luar ras tertentu. Diskriminasi seperti ini muncul ketika satu kelompok ras diperlakukan tidak adil jika dibandingkan dengan kelompok ras lainnya sehingga menerima akibat kurang menyenangkan (negatif);
2.) Perlakuan tidak langsung melibatkan ras tapi mempunyai efek terhadap kelompok rasial yang dirugikan tanpa alasan jelas.

Diskriminasi rasial ini tidak bersifat homogen, tetapi ada beberapa macamnya yaitu :

1.) Diskriminasi terang-terangan (*explicit discrimination*), dibagi menjadi:
   a.) *Verbal Antagonism*/kekerasan verbal
   Bentuk diskriminasi ini berupa ucapan, komentar yang tidak langsung membahayakan kelompok dituju, tetapi jika berlangsung terus-menerus maka akan menumbuhkan kebencian. Sering terjadi di lingkungan sekolah, kerja dll yang memungkinkan pertemuan banyak orang dari berbagai latar belakang suku.
   b.) *Avordance*
   Kelompok dominan menolak untuk bergabung dengan ras lainnya. Dalam jangka pendek tindakan ini tidak berbahaya, tetapi dalam jangka panjang dapat mengakibatkan *segregation*
   c.) *Segregation*
   Penolakan / pemisahan secara terang-terangan terhadap kelompok ras tertentu seperti terjadi pada alokasi sumber daya alam, institusi, penolakan sekolah atau pekerjaan.
   d.) *Physical attack* / Serangan fisik
   Adalah wujud diskriminasi tindak lanjut yang dilakukan kepada ras tertentu, sering dialami oleh kelompok minoritas yang tidak disukai oleh kelompok mayoritas contohnya orang asli negara tersebut.

Digital Repository Universitas Jember

e.) *Extermination* / pemusnahan ras

Jarang terjadi dan dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan terbesar.

2.) Diskriminasi Tidak Kentara/*Subtle Discrimination*

Sulit diamati dan dibuktikan biasanya berupa prasangka negatif pada kelompok tertentu namun sering mendasari bagi terjadinya tindak diskriminasi. Dibagi menjadi :

a.) *Indirect Prejudice* yaitu prasangka tidak langsung, sifatnya *hidden* yaitu menyalahkan kelompok minoritas lain atas segala ketidakbaikan yang dialami.

b.) *Automatic* yaitu tindakan diskriminasi terjadi karena besarnya prasangka dan tindakan diskriminatif oleh kelompok mayoritas dilakukan secara otomatis. Reaksi otomatis pada kelompok di luar rasnya sendiri menggambarkan adanya prasangka yang diekspresikan secara nonverbal yang selanjutnya menghasilkan penghindaran secara rasial sehingga berujung pada lingkungan diskriminatif.

3.) Diskriminasi Karena Pengaruh Organisasi

Tindakan diskriminasi diakomodir dalam organisasi di mana individu itu berada, pada awalnya hanya dilakukan secara individu, kemudian mengakibatkan bagi terjadinya penolakan-penolakan. Diskriminasi jenis ini terjadi pada bidang ekonomi, hukum, perumahan dan pendidikan.

1.4.3 Konsep Etnis.

Etnis yaitu identitas suatu kelompok yang sangat eksklusif (relatif berskala besar) didasarkan pada ide tentang kesamaan asal-usul, keanggotaan yang terutama berdasar kekerabatan dan secara khusus menunjukkan kadar kekhasan budaya.

Digital Repository Universitas Jember

Pemahaman ethnik mencakup kelompok-kelompok yang dibedakan oleh warna kulit, bahasa, agama, suku, bangsa, ras dan kasta[19].

1.5 Argumen Utama

Argumen utama dari tulisan ini adalah ada beberapa faktor penyebab mengapa pemerintah Myanmar menerapkan tindak diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Faktor tersebut adalah: pertama faktor sejarah, Pemerintah saat ini seolah ingin membalas kekecewaannya pada masa penjajahan Inggris dengan melampiaskan pada warga etnis Rohingya. Dijadikannya etnis Rohingya sebagai target pelampiasan karena etnis Rohingya dianggap memiliki kaitan erat dengan penjajah Inggris. Pada saat menjajah Myanmar, Inggris membawa sejumlah orang dari British-India termasuk di dalamnya etnis Rohingya dan memanfaatkan mereka sebagai pekerja atau pasukan berbasis etnis guna memperkuat posisi Inggris terutama pada saat menghadapi ancaman serangan dari negara lain, dalam hal ini Jepang. Keadaan inilah yang membuat etnis Rohingya dianggap dekat dengan Inggris. Di saat bersamaan, pihak Jepang sedang berupaya memperluas kekuasaannya di Asia Tenggara dan Asia Selatan, lalu membentuk pasukan berbasis etnis juga yaitu dari etnis Buddha Rakhine dan Burma untuk membantu Jepang mengusir Inggris dari Myanmar. Keadaan ini dan sejarah hubungan kurang baik dengan etnis Buddha Rakhine, membuat posisi etnis Rohingya semakin tidak disenangi. Kedua faktor politik yaitu kekhawatiran pihak junta akan keberadaan etnis Rohingya. Kelompok militer dihadapkan pada kecurigaan adanya kemungkinan perlawanan/pemberontakan dari etnis Rohingya untuk meminta otonomi bahkan kemerdekaan, hal ini tentu akan mengancam bagi kekuasaan kelompok militer. Terakhir faktor ekonomi. Pemerintah di bawah kekuasaan kelompok militer juga berkeinginan untuk menguasai ladang gas alam dan situs peninggalan Buddha *Mahamuni* di wilayah Arakan yaitu negara bagian Myanmar tempat tinggal etnis Rohingya. Seperti telah diketahui bahwa kandungan

[19] Larry Diamond & Marc F. Plattener, Nasionalisme, Konflik Ethnik & Demokrasi, ITB, Bandung 1998. hal 20 a

Digital Repository Universitas Jember

gas alam di wilayah Arakan cukup besar sehingga menarik minat pemerintah untuk dapat menguasainya termasuk menguasai situs peninggalan Buddha *Mahamuni.*

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode merupakan satu syarat melakukan penelitian. Metode bermanfaat untuk mendapatkan kerangka berfikir dan data yang dibutuhkan dengan tujuan agar karya tulis menjadi ilmiah, sistematis, kronologis. Agar suatu penelitian dapat terarah dan mendapat hasil optimal sesuai dengan apa yang diharapkan maka diperlukan suatu metode yang tepat. Menurut The Liang Gie metodologi adalah : "Cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan dari suatu gejala pada ujung awalnya, ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data. Sedang pada ujung akhirnya untuk meluruskan kebenaran pernyataan tersebut mengenai gejala tersebut"[20].

Berdasarkan definisi di atas, metode dapat disimpulkan sebagai suatu kerangka konseptual yang diterapkan pada penelitian yang dinilai dari proses pengumpulan data sampai dengan penganalisaan data sesuai dengan tujuan yaitu kebenaran dengan tingkat variabel atau gejala yang ada. Untuk mendapat kebenaran suatu penelitian, maka diperlukan data berisikan fakta. Metode yang dipakai dalam penulisa karya ilmiah ini dikategorikan dalam 2 metode yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang berarti data terhadap objek yang diteliti tidak diperoleh langsung, tetapi didapat melalui jurnal, artikel internet, koran dll sehingga metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode penelitian pustaka. Tempat yang menjadi sumber data adalah ruang baca FISIP UNEJ, Perpustakaan Pusat UNEJ, internet.

---

[20] The Liang Gie : Ilmu Politik,loc,cit

Digital Repository Universitas Jember

1.6.2 Metode Analisa Data

Penelitian harus menggunakan proses berfikir yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Pada penulisan karya ilmiah ini dipakai metode berfikir deskriptif dalam menganalisa data. Deskriptif adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi, dan cara berfikir deduktif untuk analisa data yang bertujuan menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.

1.7 Pendekatan

Pendekatan diperlukan untuk melihat permasalahan yang telah dirumuskan dan membantu memberi fokus pada pembahasan, menurut The Liang Gie:

"Pendekatan merupakan cara atau langkah berulang kali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data, sedangkan pada akhirnya merupakan suatu cara yang dibuat mengenai satu gejala yang sedang diteliti"[21]

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis memilih menggunakan pendekatan sejarah guna mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab pemerintah melaksanakan tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Tindakan sewenang-wenang pemerintah Myanmar juga telah diterapkan dalam jangka waktu cukup lama yaitu semenjak naiknya kelompok militer dan kemudian menguasai pemerintahan persisnya pada 1962[22] di mana Jenderal Ne Win diminta oleh Perdana Menteri U Nu guna mengendalikan kondisi yang saat itu sedang terjadi kekacauan politik dalam negeri dan pemberontakan etnis. Sehingga penting di sini untuk merunut ulang fakta-fakta sejarah sejak kenaikan kelompok militer memimpin pemerintahan sampai saat ini agar dapat menjawab mengapa terjadi diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

---

[21] The Liang Gie,Ilmu Politik,Gajah mada university press,Yogyakarta hal.79

[22] http://ipsnews.net/news.asp?idnews=45926SOUTH-EAST ASIA diakses pada 01 Januari 2009

Digital Repository Universitas Jember

BAB 2. GAMBARAN UMUM MYANMAR DAN ETNIS ROHINGYA

Myanmar merupakan salah satu negara terletak di wilayah Asia Tenggara, dengan mayoritas penduduknya berasal dari etnis Burma. Saat ini Myanmar berada di bawah kekuasaan pemerintah militer yang berkuasa sejak 1962.

2.1 Gambaran Umum Myanmar

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Myanmar berada pada garis lintang 9^{o} 58', U -28^{O} 29' U. garis bujur -92^{0} 11' T-101^{O} 10 'T. Dengan luas wilayahnya adalah 676.577 km^{2} [23]. Burma (Myanmar) terbentuk dari sederetan lipatan di sebelah barat dan sebuah patahan di sebelah timur. Ke dua bagian tersebut berjajar dari utara ke selatan, jajaran sebelah barat mencakup barisan Letha, Bukit Chin dan Pegunungan Arakan Yoma masing-masing dipisahkan oleh lembah dalam dan panjang membentuk batas antara Burma, India, Bangladesh. Di bagian barat menjulang Gunung Victoria, sedangkan di bagian ter-utara di perbatasan dengan Cina terdapat gunung tertinggi yaitu Gunung Hkakabo Razi, antara bagian barat dan sebelah timur terdapat dataran rendah aluasif yang membentang dari daerah delta dan lembah Sungai Irrawady dan cabang-cabangnya.

Sungai Irrawady memiliki hulu di pegunungan sebelah utara, mengalir ke selatan dan bermuara di Laut Andaman. Tanah datar di Myanmar tengah terletak di lembah Sungai Irrawady, Chidwin, Sittang merupakan daerah subur karena tanahnya adalah tanah liat terbawa oleh aliran sungai tersebut. Daerah ini mampu menghasilkan padi dalam jumlah besar terutama di bagian selatan karena dikenal sebagai daerah delta[24].

---

[23] Departemen Luar Negeri, 2002, Himpunan Keterangan Dasar Negara-Negara Akreditasi Perwakilan RI di Luar Negeri, jilid II, Jakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri RI, hal. 35-37

[24] Geography of Myanmar,http//en.wikipedia.org/wiki/Geography_06_Myanmar di akses pada 7 April 2009

Digital Repository Universitas Jember

Letak geografis Myanmar yang demikian memberikan efek positif sekaligus negatif, efek positif dimaksud adalah Myanmar terletak di posisi segitiga emas sehingga dapat memperkuat posisinya dalam pergaulan dunia. Sedangkan pengaruh negatif berasal dari sebab serupa yaitu posisi geografis, di mana dengan posisi geografis yang demikian membuat Burma pada masa lalu menjadi daerah sasaran imperial Barat dan sasaran batu loncatan Cina untuk upayanya memperlebar pengaruh ke negara-negara di Samudra Hindia[25].

Garis pantai Myanmar berada di Teluk Bengala dan Laut Andaman sehingga merupakan bagian dari Samudra Hindia. Bagian Myanmar sebelah barat berbatasan dengan India dan Bangladesh, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Laos, Thailand, Cina. Letak Myanmar yang dekat dengan garis katulistiwa dan pengaruh angin musim barat daya menyebabkan Myanmar memiliki iklim tropis dengan tiga musim yang berbeda, musim hujan yang basah dan kering, diikuti oleh musim sejuk atau dingin dan musim kering yang panas. Iklim tropis ini menyebabkan Myanmar juga mengandalkan sektor pertanian dengan hasil cukup besar. Setiap tahunnnya Myanmar menghasilkan padi dalam jumlah sangat besar sehingga mayoritas dieksport dan menghasilkan pemasukan bagi negaranya. Tujuh dari sepuluh tenaga kerja di Myanmar diserap untuk bidang pertanian.

Selain padi, Myanmar juga menghasilkan biji-bijian, kapas, tebu, tembakau dan wijen. Myanmar juga merupakan pengeksport kayu jati terkenal di dunia karena kualitas kayunya bermutu dan dukungan faktor lingkungan yaitu sepertiga wilayahnya ditutupi oleh hutan. Letak wilayah Myanmar secara regional masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Berbatasan dengan Thailand, dan Laos menyebabkan Myanmar juga dikenal dunia sebagai segitiga emas penyebaran obat bius dunia. Berbatasan dengan India dan Laos menyebabkan Myanmar memiliki sejarah kolonial

[25] Memoria Pengakhiran Jabatan Kepala Perwakilan RI Untuk Republik Sosial Burma dan Kerajaan Nepal, 1 Juni 1988, Departemen Luar Negeri, hal.1

Digital Repository Universitas Jember

yang hampir sama dengan kedua negara tersebut. Laos, India, Myanmar merupakan 3 negara yang pernah menjadi jajahan Inggris sebelum Perang Dunia II. Sistem pemerintah Myanmar dengan Laos juga terdapat beberapa kesamaan hal ini karena adanya kedekatan geografis kedua negara tersebut dengan Cina, faham komunis juga tumbuh subur di Myanmar dan Laos pada masa perang dingin. Dalam hal ini di Myanmar, Partai Komunis masih tumbuh subur bahkan setelah perang dingin berakhir. Kondisi geografis Myanmar juga menjadi salah satu pendorong kedekatannya pada organisasi regional ASEAN hingga akhirnya masuk dan diterima oleh ASEAN sebagai anggota bersama Laos dan Vietnam tahun 1997[26]. Bergabungnya Myanmar pada saat itu menyebabkan muncul keberatan dari negara mitra ASEAN seperti Amerika Serikat, Negara-negara Uni Eropa, Australia karena pemerintah militer Myanmar dianggap sering melaksanakan pelanggaran HAM, akhirnya negara mitra tadi sepakat tidak menyetujui keanggotaan Myanmar dalam ASEAN.

2.1.2 Pemerintahan Militer Myanmar

Membahas latar belakang Myanmar bersatu di bawah kekuasaan kelompok militer atau dulu disebut sebagai Burma, maka penting di sini untuk melihat kembali pada masa abad 11 ketika Raja Anawratha (1044-1077) mendirikan dinasti Myanmar pertama di Pagan, kota tepi sungai Irrawady yang berhasil menyatukan beberapa suku di mana mayoritas dari mereka adalah pendatang. Suku-suku tersebut terdiri dari: Suku Mon yaitu suku yang pertama kali tinggal di Burma berasal dari barat daya Cina 3000 tahun sebelum masehi menetap di dekat muara Sungai Salween dan Sittang, Suku Pyu yang datang kurang lebih 600 tahun setelah masehi, termasuk suku-suku lainnya seperti suku Burma, suku Chin, suku Kachin, suku Karen dan suku Shan[27]. Pada tahun 1287 Kerajaan Pagan dikalahkan oleh Kublai Khan dari

[26] www.atimes.com/atimes/southeast asia/EF27Ae02.1html diakses pada 6 April 2009
[27] Sang Merah Putih di Tanah Pagoda : Kemenangan, Masa Kini dan Harapan, 2002, Jakarta KBRI Yangoon, Hal.55

Digital Repository Universitas Jember

Mongol. Tahun 1500 muncul Kerajaan baru di bawah dinasti Toungoo yang kemudian ditumbangkan oleh pemberontak Suku Mon, tetapi pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Raja Alaungpaya. Pada masa kolonial, Burma pernah dijajah oleh Jepang dan Inggris secara berurutan. Pada 1824 Kerajaan Burma takluk oleh pasukan Inggris setelah *Anglo Burmese War* sehingga menyebabkan Burma dianeksasi menjadi sebuah provinsi bagian dari India.

Kemudian pada 1937 Burma dijadikan Negara jajahan terpisah di dalam Imperium Inggris[28]. Pada masa awal di bawah pemerintahan koloni Inggris, masyarakat Myanmar umumnya dapat menikmati kedamaian namun tanpa disadari, pengaruh pendidikan dan terpaan informasi dari luar secara bertahap akhirnya berhasil merubah perspektif generasi organisasi keagamaan Buddha murni menjadi basis kebangkitan berparadigma baru. Pada masa inilah organisasi keagamaan *Sasana Noggaha Association* di bentuk. Pada 1906 terbentuk *Young Mens Budhist Association* (YMBA). Organisasi ini merupakan perkumpulan gerakan kelompok muda yang bertujuan mengembalikan hak-hak warga atas negaranya yaitu Burma. Salah satu contoh nyata dari upaya YMBA dalam memperjuangkan hak-hak warga Burma seperti dikeluarkannya resolusi berisi celaan terhadap warga Eropa terutama dalam hal pelayanan pada alat transportasi kereta api, di mana warga keturunan Eropa sering mendapatkan jalur pelayanan khusus, dibolehkannya orang-orang Eropa untuk menggunakan alas kaki (sepatu) pada saat memasuki pagoda. Kemarahan orang Burma memuncak pada saat Inggris tidak melibatkan Burma dalam reformasi administrasi. Pada Mei 1920 diutus sebuah delegasi bertugas melobi parlemen Inggris, hasil dari lobi kelompok ini adalah suatu keputusan agar masalah Burma dimasukkan dalam daftar umum kerumahtanggaan Inggris dan mendapatkan dukungan dari 2/3 suara.

Akibat dari keberhasilan kelompok lobi ini, kemudian YMBA dalam sebuah pertemuannya menyepakati perubahan kelompok lobi ini menjadi *Great Council of*

[28] Kompas.com/ diakses pada 06 Maret 2009

Digital Repository Universitas Jember

Burmese Association (GCBA) dirancang untuk mendapatkan persekutuan dengan semua organisasi, partai dan individu. Dalam konteks nasionalisme umum, mereka juga menganjurkan pemakaian produk dalam negeri, permintaan pada pemerintah untuk mengembalikan tanah yang dikuasai dan mendistribusikan lagi pada para petani, namun sekali lagi pemerintah Inggris kurang memperhatikan tuntutan tersebut. Untuk membebaskan diri dari kolonialisme Inggris, Aung San dan Thakin Hla Myaing dilarikan ke luar negeri tepatnya ke Jepang demi meminta bantuan agar perjuangan Burma melawan Inggris berhasil. 30 orang pejuang muda (*Thirty Comrades*) yang bergelar Thakin lalu berangkat ke Jepang demi mendapatkan pendidikan militer. Di saat yang sama, selama Perang Dunia II tentara Jepang yang sedang merealisasikan cita-citanya membentuk Negara Asia Timur Raya menyerang dan menduduki Burma dengan berhasil memukul mundur pasukan Inggris sekaligus menjadikannya sebagai Negara boneka dan berstatus sebagai anggota persemakmuran Jepang pada 1 Agustus 1943 dengan Aung San sebagai Menteri Pertahanan dan U Nu menjadi semacam Menteri Luar Negeri. Di bawah kekuasaan Jepang kondisi rakyat Burma malah semakin memburuk, lalu Pada 1945 para nasionalis muda membentuk *anti fascist peoples freedom league* (AFPFL) sebagai gerakan perlawanan terhadap penjajahan Jepang sampai akhirnya Jepang terusir pada tahun yang sama oleh pejuang Burma yang dipimpin oleh Jenderal Aung San.

Pada 27 Januari 1947 Aung San bersama Perdana Menteri Clement Attle dari Inggris menandatangani kesepakatan untuk menyiapkan kemerdekaan Burma. Perjuangan mendapatkan kemerdekaan kemudian diteruskan hingga mendapatkan kemerdekaan penuh yang diberikan Inggris pada 4 Januari 1948 dengan nama *Republic of the Union of Burma*[29]. Setelah Burma mendapatkan kemerdekaan penuh dari Inggris sebagai negara independen, Burma telah menetapkan suatu konstitusi yang disahkan 4 bulan sebelumnya. Konstitusi baru ini menjadikan Burma sebagai negara berbentuk demokrasi parlementer dengan badan legislatif dua kamar dan

[29] Antara.co.id/aasummit/seenews/ diakses pada 11 Maret 2009

Digital Repository Universitas Jember

anggota dewan dipilih oleh rakyat, seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Terdapat wilayah independen yang memiliki otonomi sendiri yaitu wilayah Shan, Kachin, Kayah, Chin. Kabinet dalam pemerintah Burma dipimpin oleh partai sosial AFPFL.

Paska merdeka dari Inggris, U Nu menerapkan tatanan politik yang demokratis demi reorganisasi dan memberikan kesempatan pada kolega mudanya untuk duduk sebagai Perdana Menteri secara bergiliran. Tujuan baik U Nu malah menimbulkan kekacauan**.** Sebagai negara baru, Burma juga mengalami kondisi politik keamanan yang belum stabil. Selain disebabkan oleh kekacauan politik, juga karena adanya aktivitas gerilyawan kelompok komunis. Meski tentara Burma telah berhasil menghancurkan berbagai kelompok komunis yang ada tapi bukan berarti gerakan mereka telah terhenti. Sejarah Pemberontakan golongan komunis muncul di tahun 1950an, dilakukan oleh suku Karen di mana mereka ingin memiliki pemerintahan sendiri. Pemberontakan golongan komunis juga dilakukan oleh partai komunis Burma (CPB). Partai ini merupakan pecahan dari AFPFL yang memisahkan diri pada 1946 karena perbedaan pendapat dalam cara melakukan perjuangan mencapai kemerdekaan. Pemberontakan mereka dilakukan di awal tahun 1948 dan mencapai puncak pada 1950. Beberapa kelompok komunis lain seperti *The People Volunter Organization* (PVO) sebuah kelompok yang didirikan oleh Aung San bersama pensiunan dari angkatan bersenjata. CPB juga mendapatkan dukungan dari Cina dan dukungan semakin meningkat hingga pada 1962. CPB akhirnya hancur pada 1989 akibat konflik internal antara kelompok muda-tua. Pada pemilu 1951-1952, AFPL mendapatkan kemenangan, di mana tingkat partisipasi masyarakat dan partai amat rendah.

Pada 1958 AFPL pecah menjadi dua fraksi, kekacauan domestikpun tidak dapat terelakkan hingga PM U Nu mengundang Jendral Ne Win untuk mengendalikan kondisi. Sampai pada pemilu 1960 yang lebih jujur dan terbuka jika dibanding dengan pemilu-pemilu awal, U Nu memenangkan pemilihan kemudian menghasilkan beberapa kebijakan seperti mencanangkan agama Buddha sebagai

Digital Repository Universitas Jember

agama nasional, rencana membentuk 2 negara bagian baru yaitu Mon dan Rakhine (Arakan) yang belum masuk dalam *Union of Burma*. Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan protes massal termasuk dari etnis Shan dan Kayah menuntut agar dibentuk juga negara bagian Shan dan Kayah. Terjadinya pergolakan yang berkelanjutan hingga menyebabkan tidak stabilnya keadaan politik-keamanan dalam negeri menjadi faktor utama mendorong pengambilalihan pemerintah oleh militer terus berlanjut. Pada Januari-Februari 1962 pemerintahan U Nu menjadi goyah dan menurut kelompok militer keadaan ini amat rentan bagi terjadinya pengambilan kekuasaan oleh kelompok komunis, lalu pada 2 Maret 1962 kudeta terjadi di bawah pimpinan Jenderal Ne Win dengan alasan ingin melindungi negara dari ancaman komunis. Mulai saat itu pemerintah junta berkuasa, Jenderal Ne Win menganulir konstitusi 1947, menangkap para petinggi pemerintahan kemudian membentuk *Revolutionary Council* dan duduk sebagai ketua hingga menjadikannya sebagai kepala negara dan mendirikan suatu kediktatoran moderat.

Seperti negara diktator lainnya, yang terjadi berikutnya Myanmar mulai berupaya untuk menutup diri dengan mengesampingkan kontak dengan luar negeri, menjadikan Myanmar sebagai negara "mandiri". Hal itu terus berlanjut sampai sekarang yaitu pemerintah dijalankan dengan cara diktator *Tat Madaw* (Angkatan Bersenjata Myanmar), berhak melakukan apapun yang mereka anggap benar untuk kepentingan rezim berkuasa. Pemakaian kekerasan menjadi suatu hal wajar bagi junta untuk menekan gerakan di mana menurut mereka gerakan tersebut akan membahayakan kekuasaannya. Dari tahun 1962 -1972 pemberontakan dari partai komunis dan kelompok etnis menguasai hingga 1/3 wilayah Myanmar. Pada tahun 1972 rezim militer mundur dari pemerintahan, meski kekuasaan tetap dipegang oleh Ne Win, kondisi domestik makin kacau, ekonomi memburuk dan permusuhan di antara kelompok etnis dari tahun 1970-1980 berujung menjadi kerusuhan massal melawan pemerintah 1988.

Kerusuhan tersebut menyebabkan militer kembali mengambil alih pemerintahan dibawah rezim *state law and order resttoration council* (SLORC).

Digital Repository Universitas Jember

Tahun 1989 Burma secara resmi berganti nama menjadi Myanmar. Untuk memilih pemerintah yang sah, SLORC mengadakan pemilu tahun 1990 dan ternyata dimenangkan oleh partai NLD secara mutlak mengalahkan NUP sebagai partai dukungan pemerintah militer. Hasil dari pemilihan tersebut tidak diakui oleh pemerintahan militer hingga sekarang. Sejak saat itu tindakan pemerintah militer makin represif dalam menekan gerakan dan aktivitas prodemokrasi dengan kekerasan. Pemerintahan yang memberikan kedudukan penting bagi para Jenderal dalam menjalankan negara Myanmar itu sangat serius dalam memberantas gerakan oposan terutama para aktifis demokrasi di bawah partai NLD karena bagi mereka keberadaan partai NLD amat mengancam apalagi NLD mendapatkan dukungan masyarakat banyak. Partai NLD sendiri Terbentuk sehari paska pemerintah militer mendirikan SLORC yaitu pada 24 September 1988 dipimpin oleh Aung San Suu Kyi sebagai sekertaris jenderal partai sampai sekarang[30].

Sebagai negara yang dipimpin oleh rezim militer dan lebih mengandalkan kekuatan, Myanmar mempunyai jumlah tentara cukup besar dibandingkan negara ASEAN lainnya dengan wilayah lebih luas dan perekonomian lebih baik. Pengeluaran militer mereka mencapai setengah dari anggaran dana negara. Sejak 1987 pengeluaran militer Myanmar terus meningkat, namun pada 1995-2002 pengeluaran militer turun karena situasi ekonomi Myanmar tidak stabil sebagai akibat dari sanksi ekonomi dunia internasional. Begitupun dengan jumlah personel militer Myanmar, jumlah tentara mereka selalu naik pertahunnya, pada 1988 jumlah tentara adalah 180.000 personel. Angka itu naik menjadi 370.000 (2003) dan pengeluaran militer tertinggi di ASEAN pada tahun 2002.

[30] ICG Asia Report:Burma/Myanmar:How Strong is The Military Regime?/21 Desember 2008

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 1. Data Tentang Persentase Anggaran Belanja Militer dari APBN Negara-Negara di ASEAN

N	Negara	Anggaran	N	Negara	Anggaran
1	Burma	49,9%	6	Vietnam	11,61%
2	Singapura	29,24%	7	Malaysia	9,49%
3	Kamboja	21,05%	8	Filipina	7,93%
4	Brunai	13,19%	9	Thailand	7,49%
5	Laos	11,9%	10	Indonesia	3,33%

(sumber FRUB : Juni / 2002 *Economic Report on Burma*)

Dalam hal perekrutan personil militer, berdasarkan laporan koalisi pemberantasan terhadap pemakaian tentara anak (UNSC) Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM dengan melanggar perjanjian PBB dalam konvensi hak anak (CRC) menjadikan Myanmar sebagai Negara terbesar pemakai tentara anak berdasar laporan pengawasan HAM pada Oktober 2002, 35%-40% personil SPDC adalah anak di bawah 18 tahun. Cara perekrutannya melalui pembayaran sejumlah uang pada orang tuanya. Pada 1988 Myanmar menerima embargo senjata sekaligus peralatan militer dari Kanada dan Amerika Serikat lalu diikuti embargo senjata dan militer dari PBB pada 1990. Embargo diberikan pada Myanmar sebagai sanksi atas tindakan pelanggaran HAM yang serius di Myanmar oleh militer terhadap sipil. Meski Myanmar telah mengalami sanksi/embargo di bidang militer dari Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, Myanmar tetap mampu memenuhi kebutuhan senjata mereka melalui pembentukan kerjasama dengan Cina, Russia, India, Ukraina, Israel.

Pada 1988 dibentuklah *State Law and Order Restoration Council* di bawah pimpinan Jenderal Saw Maung yang kemudian diangkat sejak 18 September sebagai pengganti pemerintahan yang lama dan beranggotakan 19 komandan militer[31]. Tahun 1990 Myanmar menyelenggarakan pemilihan secara bebas untuk pertama kalinya dalam sejarah junta. Bagi rakyat Burma, ini merupakan anugerah atas keinginan mereka untuk bebas dari tekanan militer yang telah lama tertunda. Pemilihan itu lalu

[31] www.hamline.edu/apakabar/basisdata/97/02/21/0008.html

Digital Repository Universitas Jember

dimenangkan oleh NLD pimpinan Suu Kyi tapi SLORC menolak hasil tersebut dan memberikan status baru bagi Suu Kyi yaitu sebagai tahanan rumah dan menahan anggota NLD serta aktifis demokrasi lainnya. Tahun 1997 terjadi perombakan pemerintahan di Myanmar di mana sejumlah pejabat militer senior diganti. Kabinet SLORC telah dirombak dan sejumlah pejabat senior militer ditahan karena tuduhan korupsi.

Setelah terjadi perombakan tersebut, pemerintah militer Myanmar kemudian berganti nama menjadi *State Peace and Davelopment Council* (SPDC) di bawah pimpinan Jenderal Than Swee[32]. Myanmar di bawah kendali SPDC mengalami kemajuan penting karena pada 1997 Myanmar diterima di ASEAN namun ini tidak menjamin berubahnya kebijakan pemerintah Myanmar terutama dalam penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, karena pada Mei-Oktober 1997 terjadi 625 kali serangan seksual yang dilakukan oleh militer terhadap sipil tetapi kelompok militer kembali menyangkalnya. Pada tahun 2003 pemerintah Myanmar berganti pemimpin dan kali ini dipimpin oleh Jenderal Khin Nyut, di masa pemerintahannya Myanmar dianggap lebih buruk dibandingkan Rwanda dan Pakistan dalam hal pelanggaran HAM. Sebuah laporan yang ditulis oleh penyidik HAM PBB Paulo Sergio Pinheiro menyebutkan bahwa di Myanmar telah terjadi pemerkosaan, kerja paksa, pemindahan penduduk secara paksa dan bentuk pelanggaran HAM lainnya. Dia juga menyatakan bahwa junta masih menahan lebih dari 1.100 musuh politik. Kelompok minoritas juga terus mendapatkan perlakuan kasar dari pemerintah militer[33]. Namun dalam usaha demokratisasi Myanmar dibawah Khin Nyut mengalami beberapa kemajuan penting. Khin Nyut adalah arsitek dari peta reformasi menuju demokrasi di Myanmar meskipun pelaksanaannya sampai sekarang tidak jelas. Isi dari peta reformasi demokrasi Khin Nyut yaitu:

1.) Melakukan konvensi nasional secara bertahap, mewujudkan sistem demokrasi yang sesuai dengan Myanmar;

---

[32] South East Asia affair,Kyaw Yin Thaing:"Myanmar in 04,Why Militery Rule Continues?/hal.233)
[33] www.kompas.com/kompas cetak/0510/01/in/2092510.htm

Digital Repository Universitas Jember

2.) Merancang konstitusi baru;
3.) Menetapkan konstitusi baru melalui referendum nasional;
4.) Melaksanakan pemilihan bebas, jujur dan adil;
5.) Menetapkan dewan perwakilan melalui pemilihan;
6.) Pembentukan negara berdasar sistem demokrasi modern dan berkembang melalui pemimpin dan birokrat terpilih dari pemilihan yang dilakukan oleh dewan legislatif[34]. Khin Nyut juga menggagas perundingan antara 17 kelompok pemberontak yang berakhir pada kesepakatan damai namun dalam perkembangannya terancam batal. Dia juga membebaskan banyak tahanan politik serta membebaskan status tahanan rumah Aung San Suu Kyi. Meski begitu tetap saja pemerintahan ini bersikap diktator dan menindas terhadap pergerakan kelompok demokrat Myanmar.

Pada 30 Mei 2003 junta kembali melakukan pemberangusan massiv terhadap gerakan demokrasi Myanmar. Peristiwa ini lebih dikenal dengan nama *Black Friday* karena banyaknya aktifis prodemokrasi ditangkap dan kembali ditahannya Suu Kyi setelah dilepas setahun sebelumnya[35]. Akhir 2004 Myanmar kembali mengganti PM Khin Nyut yang belum genap setahun diturunkan paksa pada 2 November 2004 dan dikenai status tahanan rumah karena tuduhan korupsi. Khin Nyut diganti oleh Jenderal Angkatan Darat Soe Win atas perintah Jenderal Senior SPDC Than Swee[36]. Sikap moderat Khin Nyut dianggap sebagai ancaman terhadap rezim junta, sikap moderat yang dimaksud seperti lebih disukai oleh diplomat asing, menggagas peta jalan menuju reformasi demokrasi 2003, pelopor diterimanya Myanmar di ASEAN. Saat Myanmar akan mendapat giliran menjadi ketua *standing Comitte* ASEAN periode 2005/2006 pemerintah militer berupaya memperbaiki infrastruktur dalam negeri dan melakukan langkah-langkah demokratis, junta menghabiskan sekitar 5

[34] Paulo Sergio Pinheiro utusan khusus PBB untuk Myanmar,2004,Question of the Violation of Human Right and Fundamental Freedom in any part of the World,situation of Human Right in Myanmar,social and economic council,UN 27/www.ibiblio.org/
[35] Sinarharapan.co.id/berita/0507/02/op102.html/
[36] Kompas.com/kompascetak/0411/02/in/1358405.htm/Khinnyut korban perang bisnis militer Myanmar/

Digital Repository Universitas Jember

Trilliun US$ untuk memperbaiki fasilitas umum. Pada 2002 Suu Kyi dibebaskan paska ditahan pada tahun 2000. Tanggal 25 Agustus SPDC merombak kabinet militer dan menempatkan Letnan Jenderal Khin Nyut yang lebih demokrat untuk posisi Perdana Menteri menggantikan Than Swee dan di bawah pimpinan Khin Nyut berbagai upaya dijalankan demi tercapai kondisi pemerintah lebih demokratis, seperti perombakan kabinet, melanjutkan konvensi untuk membentuk draft konstitusi nasional, kemudian Myanmar juga membebaskan tahanan politik sejumlah 1.400 orang pada tahun 2004.

Pemerintahan militer juga menyebabkan semakin merosotnya perekonomian Myanmar. Militer mengontrol seluruh perindustrian secara monopoli dengan menempatkan mitra-mitra terdekat mereka pada semua posisi penting. Namun permasalahannya adalah terletak pada kemampuan dari mitra-mitra tersebut dalam menjalankan tugas sehingga mengakibatkan perekonomian mereka memburuk, padahal Myanmar dahulu pernah menjadi negara termakmur di kawasan Asia Tenggara dengan pendapatan perkapita sebesar 1.200 US$ pertahun. Sekarang di bawah rezim militer pendapatan mereka menurun dan berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya.

2.1.3 Kondisi Sosial Budaya

Negara Myanmar beribukota di Rangoon di mana pada awalnya bernama Burma dengan ibukota bernama Yangoon, perubahan ini terjadi pada Juli 1989. Myanmar terdiri dari 7 (tujuh) *state* yaitu : *Kachin, Kayah, Karen, Chin, Rakhine/Arakan, Mon, Shan, Burma*. Myanmar juga terdiri dari 7 *division* yaitu: *Sagaing, Tanin Tharyi, Baso, Magway, Mandalay, Ayeyarwady, Yangon*. Setiap *state* (negara bagian) di bagi berdasar heterogenitas kelompok etnis mayoritas, sedangkan setiap division terbagi berdasar heterogenitas kelompok etnis yang hidup di daerah tersebut. Setiap *state/division* dibagi atas beberapa *township* (kota) dan setiap *township* dibagi atas beberapa desa (*ward).* Mayoritas penduduk Myanmar menganut Agama Buddha Theravada (89,4%) sisanya adalah Islam (3,9%), Animisme (1,2%),

Digital Repository Universitas Jember

Hindu (0,5%), lain-lain (0,1%). Jumlah penduduk sekitar 51 juta, secara demografis mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma dari total warga Myanmar, beragama Buddha mendiami sebagian besar wilayah Myanmar kecuali wilayah pelosok/perbatasan. Kelompok etnis lainnya seperti: Karen yaitu suku yang beragama Buddha atau Kristen, mereka menghuni pegunungan dekat perbatasan dengan Thailand. Shan yaitu etnis beragama Buddha berkerabat dengan etnis Thai, Arakan juga disebut "Rakhine/Rakkhaing" umumnya beragama Buddha dan tinggal di perbukitan Myanmar bagian barat. Mon yaitu etnis beragama Buddha menempati kawasan selatan dekat perbatasan dengan Thailand, Kachin mayoritas beragama Kristen juga tersebar di Cina dan India, Chin yang mayoritas beragama Kristen dan menghuni dekat perbatasan dengan India, Rohingya yaitu etnis Muslim tinggal di utara Rakhine/Arakan banyak yang telah lari ke Bangladesh atau Thailand, karena ingin melarikan diri dari penindasan junta[37].

Tabel 2. Komposisi Etnis di Myanmar

N	Etnis	Persentase
1	Burma	68%
2	Chin	2,94%
3	Kachin	2,49%
4	Karen	7%
5	Karenni	2,91%
6	Mon	2,80%
7	Arakan	5,39%
8	Rohingya	1,35%
9	Shan	3,92%
10	Lain-lain	3,20%

Dikutip dari berbagai sumber

[37] Kompas, Rabu 28 Januari 2009 hal.8/kolom internasional/Pengungsi Rohingya Banjiri Thailand/

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 3. Daftar Etnis yang Diakui oleh Pemerintah Junta Militer

No.	Negara Bagian	Nama Etnis
1.	Burma	Burma, Dawei, Beik, Yaw, Yabein, Kadu, Ganan, Salon, Hpon
2.	Chin	Chin, Meithei (Kathe), Saline, Ka Lin Kaw (Lushay), Khami, Awa Khami, Khawno, Kaungso, Kaung Saing Chin, Kwelshin, Kwangli (Sim),Gunte (Lyente), Gwete, Ngorn, Zizan, Sentang, Saing Zan, Za How, Zotung, Zo Pe, Zo, Zahnyet (Zanniet), Tapong, Tiddim (Hai Dim), Tay Zan, Taishon, Thado, Torr, Dim, Dai (Yindu), Naga, Tanghkul, Malin, Panun, Magun, Matu, Miram (Mara), Mi-er, Mgan, Lushei (Lushay), Laymyo, Lyente, Lawhtu, Lai, Laizao, Wakim (Mro), Haulngo, Anu, Anun, Oo Pu, Lhinbu, Asho (Plain), Rongtu
3.	Kachin	Kachin,. Trone, Dalaung, Jinghpaw, Guari, Hkahku, Duleng, Maru (Lawgore), Rawang, Lashi (La Chit), Atsi, Lisu
4.	Karen	Kayin, Kayinpyu, Pa Le Chi, Mon Kayin (Sarpyu), Sgaw, Ta Lay Pwa, Paku, Bwe, Monnepwa, Monpwa, Shu (Pwo)
5.	Karenni	Kayah, Zayein, Kayan (Padaung), Gheko, Kebar, Bre (Ka Yaw), Manu Manaw, Yin Talai, Yin Baw
6.	Mon	Mon
7.	Arakan	Rakhine (Rakhaing), Kamein, Kwe Myi, Daingnet, Maramagyi, Mro, Thet
8.	Shan	Yun (Lao), Kwi, Pyin, Yao, Danaw, Pale, En, Son, Khamu, Kaw (Akha E Kaw), Kokang, Khamti Shan, Hkun, Taungyo, Danu, Palaung, Man Zi, Yin Kya, Yin Net, Shan Gale, Shan Gyi, Lahu, Intha, Eik Swair, Pa'O, Tai Loi, Tai Lem, Tai Lon, Tai Lay, Maingtha, Maw Shan, Wa

Sumber : *Burma Human Right Year Book 2006, Human Right Documentation Unit of The National Coalition of The Union of Burma*

Pengaruh Buddha amat kuat dalam bidang-bidang kehidupan warga Myanmar seperti bidang sosial, budaya dan cara berfikir. Pemerintah memberi subsidi besar kepada misi Buddha untuk menyebarkan ajaran Buddha. Myanmar juga dikenal

Digital Repository Universitas Jember

sebagai *The rice bowl of Asia* karena merupakan penghasil beras terbesar di Asia sekaligus sangat menggantungkan perekonomiannya pada eksport beras, sisanya rakyat bermata pencaharian di bidang pertambangan, perhutanan, perikanan[38]

2.1.4 Kondisi Perekonomian

Penggunaan kekuatan militer oleh pemerintahan Myanmar pada awalnya ditujukan untuk menghentikan pemberontakan oleh sisa-sisa kelompok komunis agar terwujud stabilitas politik dan ekonomi, namun dalam perkembangannya kekuatan militer tidak hanya dimanfaatkan untuk menghentikan pemberontakan kelompok komunis saja, karena kekuasaan mereka bahkan telah merambah sampai pada bidang-bidang lain di antaranya adalah bidang perekonomian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Myanmar sempat menjadi negara termakmur di kawasan Asia Tenggara dan salah satu negara pengeksport beras namun setelah naiknya kelompok militer ditandai dengan munculnya Jenderal Ne Win maka perekonomian Myanmar menerapkan paham sosialis membuat perekonomian Myanmar menjadi kerdil dan pincang karena salah urus, korupsi dan penyerahan posisi-posisi penting hanya pada mitra terdekat maka hasilnya adalah pendapatan perkapita mereka menurun bahkan keadaan ini diperparah oleh dijatuhkannya sanksi perekonomian dari negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat berupa embargo, penolakan semua jenis produk dari Myanmar sehingga praktis produksi nasional mereka tidak terserap. Permasalahan ekonomi negara memuncak pada 1987-1988 dengan terjadinya kekurangan nasi (bahan pangan) dan devaluasi mata uang, demonstrasi, penghasutan dari kelompok militer sampai terjadinya kerusuhan mengakibatkan pertumpahan darah pada 8 Agustus 1988[39].

Keadaan keamanan, kondisi politik yang tidak stabil juga berimbas pada pertumbuhan perekonomian di setiap negara termasuk dalam hal ini adalah Myanmar.

---

[38] Myanmar Dalam Negara dan Bangsa : Asia, 1990 jilid III, Grolier Internasional inc hal.171
[39] Threat to the Peace: A Call for the UN Security Council to act in Burma,Vaclav Havel,DLA PIPPER RUDNICK GRAY CARY,2005 hal. 20

Digital Repository Universitas Jember

Masih belum diterapkannya sistem demokrasi secara benar, penghargaan terhadap hak asasi yang buruk, mengakibatkan Myanmar sering mendapatkan protes bahkan boikot sampai pada pemberian sanksi ekonomi membuat banyak produk dari Myanmar kehilangan pasarnya, ditutupnya Bank-bank asing seperti perwakilan Bank Malaysia, Bank Korea Selatan, Bank Thailand sehingga cadangan valuta asing di Myanmar terus berkurang akibat lanjutnya adalah nilai mata uang Myanmar (Kyatt) semakin menurun. Sanksi berkepanjangan yang dikenakan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah karena permintaan aktifis demokrasi Myanmar di luar negeri menyebabkan kecilnya investasi asing dan kegiatan perdagangan yang berlangsung di Myanmar. Sampai saat ini Myanmar tercatat sebagai salah satu negara berpendapatan perkapita terendah di dunia.

Hampir tidak adanya investasi asing di Myanmar menyebabkan tidak ada pemasukan devisa ke Myanmar. Di bidang pariwisata, larangan bepergian ke Myanmar yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap warganya semakin mengurangi sumber devisa Myanmar. Untuk mengatasi kekurangan anggaran pembangunan, pemerintah militer mengatasinya dengan mencetak uang dalam jumlah banyak. Kebijakan ini mengakibatkan tingginya inflasi di Myanmar akibat rendahnya nilai mata uang Kyatt. Inflasi di Myanmar saat ini termasuk dalam kategori *hiper inflasi*[40]yang mencapai 51,5% jika *hiper inflasi* terjadi dalam waktu lama, inflasi tersebut akan menghancurkan perekonomian dan sendi-sendi sosial politik dalam suatu negara. Nilai tukar kyatt mengalami perbedaan sangat jauh antara nilai tukar resmi dan nilai di pasar gelap. Tahun 1997 nilai tukar resmi berada pada kisaran 6,7 kyatt perdolar AS, Sedangkan di pasar gelap dijual senilai 400 kyatt, kemudian pada tahun 2003 terus melemah mencapai 900 kyatt per dollar AS.

Sanksi perdagangan yang diterima oleh Myanmar membuatnya kehilangan mitra dagang. Selama ini Myanmar hanya bisa mengeksport bahan mentah ke beberapa negara seperti India, Cina dan negara-negara di ASEAN. Tetapi pendapatan

[40] Boediono,Ekonomi Moneter,Edisi 3,BPFE,Yogyakarta,1998,hal:162

Digital Repository Universitas Jember

dari eksport bahan mentah tersebut tidak sebanding dengan harga import barang yang harus dibayar Myanmar. Sejak tahun 1995 sampai 2000 Myanmar mengalami defisit perdagangan dan terus meningkat[41]. Pada Juli 2003 Myanmar mendapatkan boikot dunia internasional karena terbukti melaksanakan praktek kerja paksa terhadap penduduk setempat untuk membangun proyek pemerintah. Keadaan ini diketahui melalui laporan dari kelompok *Burma Foreign Trade Union Council* (FTUC) bermarkas di AS bekerjasama dengan *The National Coalition Government of The Union of Burma* (NCGUB)[42] kepada dunia internasional untuk segera memberikan sanksi kepada Myanmar. Tindakan mereka akhirnya menghasilkan sanksi, Myanmarpun kehilangan pasar eksport besarnya di bidang tekstil terutama dengan AS, karena selama ini pasar AS merupakan pasar eksport terbesar untuk produk tekstil Myanmar. Dari tahun 1999 sampai 2002 eksport Myanmar terhadap AS dalam bidang garmen terus meningkat. Dari 100 juta US$ pada tahun 1999 terus naik hingga angka 400-500 juta US$ di tahun 2002. Pemboikotan ini mengakibatkan 350.000 orang Myanmar kehilangan pekerjaan terutama dari sektor industri kecil, akibat lanjut dari pemboikotan ini adalah semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam perdagangan obat terlarang atau pada kegiatan prostitusi.

Ketidakseimbangan neraca perdagangan tersebut menyebabkan Myanmar lebih memperhatikan pada kegiatan perekonomian dalam negeri terutama untuk sektor pertanian. Bidang pertanian merupakan sektor ekonomi terpenting karena hasilnya dapat dinikmati oleh semua lapisan rakyat. Namun sekali lagi akibat penanganan sektor pertanian kurang baik di mana para pejabatnya mayoritas berasal dari kelompok militer yang pengalaman dan kemampuan masih minim di bidangnya, mengakibatkan rakyat tidak bisa lagi mengandalkan sektor pertanian. Contoh adanya "salah atur" dalam sektor pertanian, seperti penetapan pajak sangat tinggi terhadap hasil pertanian yaitu sebesar 12% dari hasil panen mereka, rakyat harus menjual hasil

[41] Daw marlar aung,collection and compilation of import data in the union of Myanmar,the government of the union of myanmar ministry of national planning and economic development,2001
[42] Robert H. Taylor,Myanmar,road map to where?,southeast asian affairs 2004,CSIS,hal:183

Digital Repository Universitas Jember

panennya pada pemerintah dengan harga lebih rendah dari harga di pasaran bahkan rakyat dipaksa untuk menjual hasil panennya pada pemerintah saja, hal ini diterapkan oleh pemerintah karena ingin memperkuat posisi monopolinya terutama untuk kegiatan eksport ke luar negeri. Belum lagi praktek korupsi yaitu para pejabat yang ingin memperkaya diri sendiri dilakukan oleh para pejabat militer.

Salah atur (*missmanagement)* tidak hanya terjadi pada bidang pertanian, bidang lainnya seperti penangkapan ikan/nelayan juga mengalami hal serupa. Pemerintah militer mewajibkan warganya yang ingin menangkap ikan agar terlebih dulu mendapatkan izin dan pembayaran sejumlah uang pada pemerintah terutama pada saat alat tangkapnya adalah jala, praktis karena aturan ini hanya nelayan kaya saja yang mampu mendapat izin dimaksud karena biayanya cukup mahal. Sedangkan bagi nelayan tradisional di mana mereka tidak mampu membayar harga perizinan, maka mereka hanya bisa menangkap ikan sekedar dipakai untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga kembali terdapat faktor kuat penyebab semakin banyaknya jumlah pengangguran, kemiskinan, praktek prostitusi dan orang terlibat dalam perdagangan obat-obat terlarang di Myanmar.

2.1.5 Bidang Pendidikan

Aturan-aturan ketat yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar terhadap warganya juga terjadi pada bidang pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan warga untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, pembatasan tersebut terwujud melalui adanya suatu aturan (kontrak) di mana aturan tersebut mengharuskan warganya untuk tidak akan terlibat dalam seluruh kegiatan yang dapat mengancam pemerintahan militer. Keadaan itu menjadi penyebab rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM) di Myanmar. Kesulitan dalam hal pembiayaan pendidikan juga turut memperburuk tingkat SDM di Myanmar. Ini terbukti dengan banyaknya anak setingkat sekolah dasar harus putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membayar mahalnya biaya pendidikan.

Digital Repository Universitas Jember

Faktor lain yang turut berpengaruh bagi rendahnya kualitas sumber daya manusia di Myanmar adalah akses terhadap informasi juga dibatasi. Pemerintah militer melakukan pengawasan ketat terhadap pemakaian/akses teknologi internet. Untuk dapat memanfaatkan internet mereka harus mendapatkan izin dari pemerintah, jika melanggar peraturan ini mereka akan dijatuhi sanksi hukuman penjara selama 15 tahun. Rendahnya gaji guru dan dosen di Myanmar menyebabkan sistem pendidikan berjalan tidak baik. Secara umum para pendidik di Myanmar menerima suap untuk memberi nilai pada anak didiknya.

Seorang dosen di Myanmar menerima bayaran sekitar 7-8 US$ perbulan, sedangkan profesor dibayar sebesar 20 US$ perbulannya[43]. Adanya sanksi dari negara-negara barat semakin memperburuk kualitas sumber daya manusia di Myanmar. Ketika Myanmar berada di bawah pemerintahan PM U Nu, Amerika Serikat memberikan beasiswa kepada masyarakat Myanmar yang memiliki prestasi baik guna menambah ilmunya di negara barat. Tetapi setelah kudeta militer, negara barat tidak lagi memberikan beasiswa pada rakyat Myanmar. Larangan bagi masyarakat Myanmar untuk bepergian ke wilayah Amerika Serikat dan Uni Eropa semakin mempersulit rakyat Myanmar guna mendapatkan pendidikan lebih baik. Sampai saat ini negara yang memberikan beasiswa kepada rakyat Myanmar berasal dari negara-negara seperti: Jepang, Cina, India, Malaysia, Singapura dan Philipina.

2.2 Gambaran Umum Etnis Rohingya

Etnis Rohingya adalah penduduk asli negara bagian Arakan, merupakan keturunan dari campuran orang Bengali, Persia, Mongol, Turki, Melayu, Arab dan menjadi penduduk minoritas di Arakan. Namun setelah kemerdekaan Burma (Myanmar) populasi etnis Rohingya terus berusaha dikurangi, melalui beberapa tindakan mulai dari pengusiran hingga pembunuhan, sampai saat ini hanya tersisa sedikit etnis Muslim Rohingya di Arakan, karena populasi etnis Rohingya terpojok di

[43] Kyaw Yin H,Reconciling Burma/ Myanmar:Essays on US Relation With Burma .dalam NBR Analysis;Volume 15,number 1,Maret 2004,hal;81

Digital Repository Universitas Jember

bagian utara Arakan[44]. Terdapat dua pendapat berbeda terkait dengan sejarah keberadaan etnis Rohingya di negara bagian Arakan. Pertama datang dari kelompok Buddha Rakhine yang berpendapat bahwa keberadaan etnis Rohingya dimulai sejak kedatangannya di negara bagian Arakan bersama pasukan dari Kerajaan Inggris pada abad 19 dan 20. Kemudian nama "Rohingya" dibuat oleh kelompok Muslim Bengali agar mereka bisa mendapatkan status sebagai salah satu etnis asli Burma seperti status yang telah diberikan pada etnis Shan, Karen, Kachin dll. Dengan diperolehnya status sebagai etnis asli Burma, maka dapat memungkinkan mereka untuk mengklaim bahwa negara bagian Arakan adalah wilayah asal mereka dan membangun suatu wilayah yang diperuntukkan hanya untuk orang Muslim Rohingya. Kenyataan tersebut diperkuat dengan suatu fakta bahwa pada 1942 pernah terjadi peristiwa pembunuhan massal, dan pergerakan *Mujaheed* pada tahun 1947 yang menuntut otonomi khusus bahkan tidak jarang diikuti dengan usaha penggabungan negara bagian Arakan dengan Pakistan timur (Bangladesh).

Sedangkan kelompok Muslim Rohingya berpendapat bahwa keberadaan mereka di negara bagian Arakan diperkirakan dimulai sejak berdirinya Kerajaan Islam yang pernah menguasai wilayah Arakan pada 1430[45] dan telah berkuasa selama bertahun-tahun. Fakta ini juga diperkuat oleh beberapa raja yang pernah berkuasa di mana nama dari raja-raja tersebut sangat terkait erat dengan unsur Islam seperti: Solaiman Shah Narameikhla (1430-1434), (2) Ali Khan Meng Khari/Narameikhla (1434-1459), (3) Kalima Shah Ba Saw Phyu (1459-1482), (4) Mathu Shah Doulya (1482-1492), (5) Mohammed Shah Ba Saw Nyo (1492-1493), (6) Nori Shah Ran Aung (1493-1494), (7) Sheikh Modullah Shah Salingathu (1494-1501), (8) Ili Shah Meng Raza (1501-1523), (9) Ilias Shah Kasabadi (1523-1525), (10) Jalal Shah Meng Saw Oo (1525), (11) Ali Shah Thatasa (1525-1531), (12) Salimshah (1608)[46].

---

[44] http://ji-indonesia.com/pipermail/an-nuur_ji-indonesia.com/2009-February/001364.html diakses pada 03 Februari 2009

[45] Arakan Rohingya National Organization, NCGUB pushing the Rohingya from the frying-pan into the fire , 13 February 2009

[46] http://nation.ittefaq.com/issues/2009/04/21/news0029.htm

Digital Repository Universitas Jember

Kerajaan Islam itu sebenarnya masih dipengaruhi oleh ajaran Buddha dengan pengikutnya sebagian besar merupakan keturunan indo-aria. Pengaruh Islam mulai menguat setelah masuknya para pedagang dari Arab pada abad ke-17 yang pada saat itu Kerajaan berada di bawah kekuasaan dinasti Mrauk Oo. Selanjutnya dapat dipastikan pengaruh Islam berhasil sedikit demi sedikit menggeser pengaruh Buddha karena penyebaran pengaruh Islam dilakukan dengan sederhana dan memanfaatkan pendekatan budaya seperti melalui pernikahan antar keturunan, kegiatan perdagangan dll. Perbedaan pandang ini mengakibatkan hubungan antara kedua kelompok dalam wilayah Arakan yaitu etnis Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine tidak harmonis karena kelompok Buddha Rakhine menganggap bahwa wilayah Arakan adalah warisan dari sang Buddha, sedangkan kelompok Muslim Rohingya yakin bahwa di zaman dahulu pernah terdapat Kerajaan Islam dan pernah menguasai wilayah ini dalam jangka waktu cukup lama. Kerajaan Islam dimaksud oleh etnis Rohingya adalah *Din-nya-waddy,* menurut etnis Rohingya Muslim, Kerajaan ini telah berdiri sekitar tahun 146 masehi[47] terletak di sekitar teluk Bengal.

Kerajaan ini secara alami memiliki keterkaitan erat dengan etnis di anak benua Asia (India) dari pada etnis-etnis di Myanmar. Keadaan seperti ini didukung dengan kondisi alam yang mana wilayah Kerajaan Islam *Din-nya-waddy* dipisahkan oleh rangkaian pegunungan Arakan Yoma membuatnya menempati wilayah cukup berbeda. Pada masa ini wilayah Arakan menjadi wilayah perebutan pengaruh antara Budaya Buddha, Muslim dan Hindu. Pada tahun 1440 Raja Narameikhla beserta pengikutnya dari Kerajaan Islam dipaksa untuk mencari perlindungan di Bengali setelah invasi Kerajaan Burma di bawah Raja Boddawpaya. Raja Narameikhla lalu diterima dengan baik oleh Sultan Jalaluddin Muhammad Shah, Beliau merupakan Sultan Gaur (ibu kota Bengali) yang kemudian turut membantu memperbaiki kekuasaan Raja Narameikhla.

[47] G.E Harvey ."History of Burma" Frank Cass & Co. Ltd , London, 1925 and 1967

Digital Repository Universitas Jember

Pada abad 16 beberapa perompak asing terutama dari Portugis datang dan berhasil mengalahkan kekuasaan Kerajaan Burma dan membuat wilayah Arakan menjadi wilayah tanpa penguasa. Setelah itu mulailah berdatangan pedagang-pedagang dari Perancis, Inggris, Belanda di mana kehadiran mereka tidak hanya ingin berdagang beberapa komoditas rempah, tetapi juga tertarik untuk "membeli" budak dari wilayah Asia Tenggara dan termasuk di dalamnya adalah budak dari Burma. Kehadiran para pedagang ini membuat wilayah Arakan semakin anarkis setelah sebelumnya akibat dari kehadiran perompak Portugis wilayah ini menjadi tanpa penguasa. Tahun 1784 Raja Boddawpaya dari Burma berhasil mengambil alih kekuasaan atas wilayah Arakan dan menjadikan Arakan sebagai provinsi dari Kerajaan Burma. Pada tahun 1826 setelah perang *Anglo-Burman* pertama terjadi, wilayah ini termasuk Burma dan Tenasserim diserahkan pada penjajah Inggris melalui pengesahan perjanjian *Yandabo*, bersama ini pula banyak orang dari British India termasuk etnis Rohingya dibawa ke wilayah Arakan untuk dijadikan pekerja atau pegawai pada pemerintahan koloni Inggris. Lalu dengan *Government of India Act* tahun 1935 diputuskan bahwa Burma terpisah dari British-India tepatnya mulai tanggal 1 April 1937. Melalui keputusan ini pula digabungkanlah Arakan menjadi bagian British-Burma, bertentangan dengan keinginan penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India, hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma merdeka pada tahun 1948[48].

Setelah Burma bersatu mencapai kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1948, para biksu dari Arakan bersama kelompok intelektual termasuk di dalamnya mantan Perdana Menteri Burma di bawah penjajahan Inggris Sir Paw Tun, mulai meminta pengakuan terhadap sejarah latar belakang wilayah Arakan dan mendukung upaya pembentukan negara bagian Arakan. Di lain pihak, perwakilan dari kelompok Muslim Arakan (yang pada saat itu telah mempersiapkan nama "Rohingya" sebagai identitas kolektif mereka, tetapi nama tersebut masih belum

[48] Ebo Briefing Paper NO.2 2009/The Rohingya's : Bengali Muslims or Arakan Rohingyas?

Digital Repository Universitas Jember

resmi digunakan) secara kuat menolak tuntutan tersebut, karena menurut mereka jika tuntutan tersebut dipenuhi maka praktis kelompok Buddha Rakhine akan menguasai seluruh wilayah Arakan. Lalu pada tahun 1961, PM U Nu akhirnya memutuskan untuk mendirikan negara bagian Arakan dengan daerah Mayu yang terdiri atas Buthidaung, Maungdaw dan Rathedaung sebagai daerah terpisah dari negara bagian Arakan[49]. Ditetapkannya daerah Mayu sebagai daerah terpisah, karena pemerintah pusat tetap ingin mempertahankan dukungan dari kelompok Muslim. Perdana Menteri U Nu juga memerintahkan radio pemerintah Burma untuk menyiarkan program-program dalam bahasa Rohingya[50]. Namun status otonomi tidak diberikan pada negara bagian Arakan agar dapat mempertahankan kendali pemerintah pusat atas wilayah ini. Setelah melalui proses pertimbangan yang cukup lama, akhirnya kelompok Muslim atas nama *Mayu Frontier Administration* bersedia menerima kebijakan dari pemerintah tersebut[51]. Kebijakan ini diteruskan sampai pada pemerintahan di bawah kekuasaan Jenderal Ne Win.

Untuk mengetahui mengapa dan bagaimana etnis Rohingya sampai saat ini mengalami tindak diskriminasi oleh pemerintah Myanmar, maka penting agar melihat keadaan etnis Rohingya dan wilayah Arakan terutama pada masa penjajahan Inggris dan Jepang. Nama "Rohingya" sendiri berasal dari *Rohan*, *Roham* atau *Rosham*, yang dalam hal ini mengarah pada nama ibukota kuno Kerajaan Arakan di bawah kekuasaan dinasti Mrauk Oo[52]. Terdapat sekitar 600.000-800.000 populasi etnis Rohingya di Myanmar meskipun data tersebut masih diragukan kebenarannya karena tidak adanya data yang tepat dan tertutupnya akses terhadap etnis Rohingya. Pada saat Jepang memulai invasi terhadap Burma di mana pada saat itu berada di bawah penjajahan Inggris, Arakan menjadi salah satu wilayah yang mengalami konflik etnis dan agama yaitu melibatkan kelompok Buddha Rakhine dan kelompok Islam.

---

[49] http://ric.Rohingyainfo.com/?p=151&lang=id diakses pada 10 April 2009
[50] Dr San Oo Aung. http://sanooaung.wordpress.com
[51] Yegar, 2002: 49-51
[52] http://www.themalaysianinsider.com/index.php/opinion/alice-nah/20814-a-regional-solution-for-rohingya diakses pada 06 Maret 2009

Digital Repository Universitas Jember

Konflik ini semakin rumit akibat dari kebijakan baik dari pihak Jepang atau Inggris untuk menjadikan wilayah Arakan sebagai garis depan pertahanan terutama dari pihak Jepang agar dapat memperluas kekuasaannya ke wilayah India. Kemudian Jepang memanfaatkan etnis Buddha Rakhine dan etnis Burma dengan membentuk suatu pasukan pertahanan bernama *Patriot Arakan Force* dan melalui strategi ini Jepang berhasil memukul mundur keberadaan Inggris dari wilayah Burma.

Menanggapi kekalahan dari Jepang, pihak Inggris kemudian juga membentuk pasukan pertahanan berbasis kelompok etnis dan dalam hal ini Inggris memanfaatkan kelompok Islam[53]. Pasukan ini diberi nama *Force V* yang selanjutnya di bawah komando Inggris pasukan ini melaksanakan serangan balasan pada April 1942 dan berhasil menempatkan pasukan ini di wilayah Maungdaw, Buthidaung. Sebuah laporan dari Inggris menunjukkan bahwa pada 13 November 1942 tidak ada lagi orang-orang dari etnis Buddha Rakkhine dan Burma di wilayah Buthidaung karena pasukan dari *Force V* mengusir mereka lalu memproklamirkan kemenangannya dalam bahasa Urdu. Di dalam proklamasi tersebut disebutkan juga bahwa bahasa Arakan dan bahasa Burma bukan lagi menjadi bahasa bersama (alat pemersatu). Dari peristiwa kemenangan pasukan *Force V*, maka jelas sekali bahwa sebenarnya kemenangan tersebut lebih mengarah pada kemenangan atas kelompok Buddha Rakhine atau sesama rakyat Burma dari pada terhadap kekuasaan Jepang.

Selanjutnya kelompok Islam tadi berupaya untuk memperkuat kemampuan pasukannya melalui pembentukan suatu kerjasama dengan pemimpin Pakistan saat itu, Presiden Ali Jinnah agar mereka dapat disatukan dengan Pakistan timur (saat ini menjadi Bangladesh). Permintaan tersebut yang kemudian mendorong tumbuhnya sikap ketidaksenangan pemerintah terhadap etnis Rohingya dan bahkan bertahan sampai saat ini. Setelah satu tahun peristiwa tersebut, wilayah Arakan akhirnya kembali kepada kekuasaan Inggris, tetapi ini tidak berarti bahwa konfrontasi antara

[53] http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=45850#idiomas di akses pada 4 Maret 2009

Digital Repository Universitas Jember

kelompok Islam dengan Buddha Rakhine berakhir damai. Hal ini terbukti dengan terjadinya pembunuhan terhadap seorang pegawai Buddha di sub-divisi Maungdaw, termasuk masih terjadinya gangguan terhadap kelompok Islam oleh orang-orang dari kelompok Buddha Rakkhaing/Rakhine, kedatangan sejumlah orang dari kelompok Islam di wilayah Arakan karena musibah kelaparan.

Sampai akhirnya Burma mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris tahun 1948, di mana pada saat itu U Nu menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada masa pemerintahan PM U Nu keberadaan etnis Rohingya diterima dengan baik yang dibuktikan dengan diberikannya daerah Mayu (terdiri dari wilayah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung) sebagai daerah terpisah dari negara bagian Arakan untuk etnis Rohingya, adanya kebijakan untuk menyiarkan suatu program khusus di radio negeri dalam bahasa Rohingya. Namun keadaan mulai berubah pada saat kelompok militer menguasai pemerintahan. Beberapa tindakan diambil oleh pemerintah terutama tindakan terkait dengan keberadaan etnis Rohingya di Arakan yang mana tindakan tersebut secara sengaja dijalankan agar dapat memaksa orang-orang dari etnis Rohingya meninggalkan wilayah Arakan. Tindakan itu seperti penarikan pengakuan pemerintah atas status etnis Rohingya sebagai warga negara Burma, pembatasan kebebasan bergerak, pembatasan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan atau kesehatan dsb[54]. Keseluruhan tindakan tersebut bukan hanya mengakibatkan penderitaan bagi etnis Rohingya tetapi juga membuat keberadaan etnis Rohingya semakin terasing dan tertinggal dari kehidupan masyarakat Burma, karena keberadaan etnis Rohingya jarang mendapatkan perhatian dari pihak luar seperti yang disebutkan oleh Benedict Rogers, deputi partai konservatif di Inggris, "bahwa mayoritas wartawan, badan bantuan dan aktivis sosial cenderung melewati Thailand jika ingin menuju ke Myanmar di mana akses terhadap pengungsi lebih mudah sedangkan di wilayah lain seperti perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh jarang mendapatkan perhatian di mana pada wilayah ini sedang terjadi

[54] http://www.asiantribute.com/?q=node/16491/the Bali Process&R2P:Who is to protect the Rohingyas? Friday, 2009-04-03 00:57

Digital Repository Universitas Jember

praktek genosida "secara perlahan dan terlupakan"[55] termasuk juga karena begitu kompleksnya pembatasan yang diberikan. Pada tahun 1974 pemerintah Burma mengeluarkan Undang-Undang (UU) darurat keimigrasian di mana UU ini disusun dengan tujuan dapat membatasi aliran imigran dari India, Cina dan Bangladesh. Melalui UU ini pemerintah mewajibkan semua warga negara Burma untuk membawa kartu identitas (*NRC)*, tetapi etnis Rohingya hanya ditawarkan suatu kartu tanda registrasi bagi orang asing (*FRCs*). Seorang individu yang terbukti tidak memiliki *FRCs*, tidak secara otomatis membuat pemerintah dengan mudahnya mengusir individu tersebut. Orang-orang dari etnis Rohingya masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan *FRCs* meskipun harus memberikan uang dalam jumlah besar kepada petugas atau pemalsuan identitas.

Pada tahun 1977, pemerintah menjalankan program *Nagamin (Dragon King).* Program ini bertujuan untuk meneliti setiap individu yang tinggal di Burma, penandaan sebagai warga negara dan orang asing sesuai hukum di Burma termasuk menindak orang asing yang telah memasuki Burma secara ilegal[56]. Program ini memiliki ruang lingkup nasional mengakibatkan terjadinya beberapa serangan besar-besaran terhadap tempat tinggal etnis minoritas di mana pemerintah menganggap mereka sebagai migran ilegal termasuk dalam hal ini penyerangan tersebut juga ditujukan pada etnis Rohingya, fakta menunjukkan bahwa penyerangan terhadap etnis Rohingya juga melibatkan orang-orang dari kelompok Buddha Rakhine. Akibat dari serangan besar-besaran ini, banyak orang dari etnis Rohingya terpaksa harus meninggalkan Burma menuju negara terdekat yaitu Bangladesh. Tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya ternyata tidak dijalankan oleh pemerintah Myanmar saja, di level lebih rendah yaitu masyarakat sipil, umat Buddha nasional (mayoritas) juga menerapkan tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya,

[55]Terdapat dalam artikel "Burma's Muslim Rohingya Minority Dwell at the "Brink of Extermination" Benedict Rogers, the Deputy Chairman of the UK Conservative Party's Human Rights Commission and the Advocacy Officer of the CSW for South Asia

[56] http://www.aliran.com/index.php?option=com_content&view=article &id=895:asean-has-failed-to-save-rohingyas&catid=76:2009&Itemid=40 Wednesday, 15 April 2009 15:13

Digital Repository Universitas Jember

contohnya seperti pernah terjadi pada sebuah organisasi perlindungan kelompok politik Myanmar pengasingan di Jepang (BOJ) yang menolak BRAJ *(Burma Rohingya Association in Japan*) yaitu kumpulan orang Rohingya yang lari ke Jepang untuk bergabung ke BOJ, dengan alasan bahwa status etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar masih diragukan termasuk tindakan diskriminasi dilakukan oleh kelompok Buddha Rakkhaing/Rakhine di Arakan.

Masih berlangsungnya tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya bahkan sampai saat ini berakibat pada semakin meningkatnya jumlah pelarian etnis Rohingya dari Myanmar menuju negara tetangga atau bahkan negara dengan jarak cukup jauh dari Myanmar seperti Malaysia, Thailand, Pakistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, selain Bangladesh sebagai negara tetangga terdekat dengan wilayah Arakan.

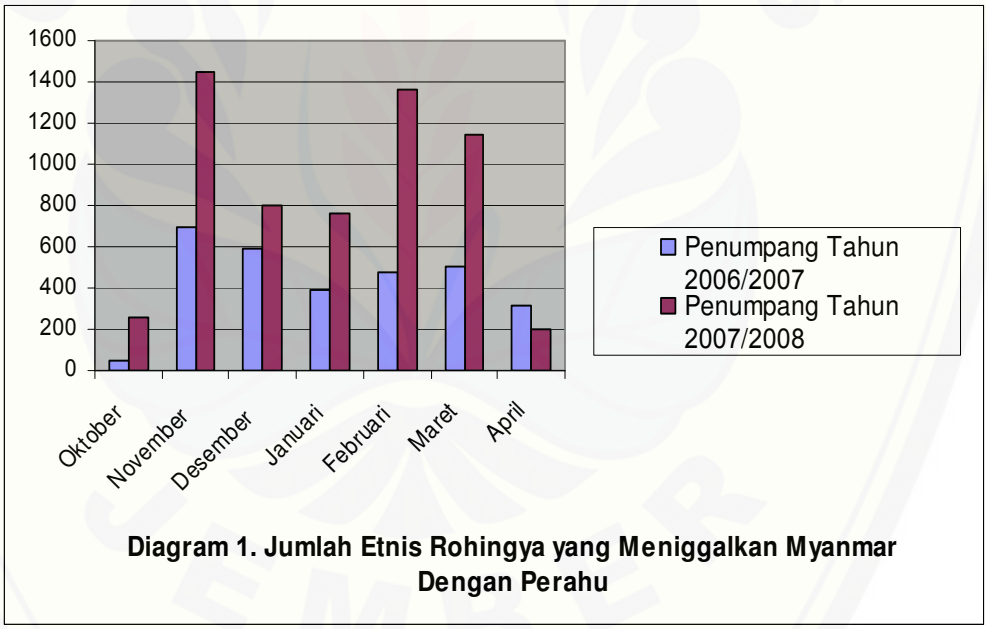

Diagram 1. Jumlah Etnis Rohingya yang Meniggalkan Myanmar Dengan Perahu

Diagram tentang jumlah penumpang yang menuju ke luar negeri dari Myanmar dengan perahu. Sumber : *Arakan Project,* data di atas juga dapat dilihat di jurnal Altsean Burma BN 2009/1049: January 30, 2009, updated 16 February 2009

Keadaan orang-orang dari etnis Rohingya di negara pelarian tadi tidak lantas menjadi lebih baik, karena kenyataannya sebagian besar dari mereka tidak disertai dengan dokumen sah yang dapat melindungi keberadaan mereka di negara pelarian.

Digital Repository Universitas Jember

Beberapa negara penerima menganggap mereka sebagai migran ilegal sehingga rentan menjadi sasaran tindak kekerasan, pemerasan atau bahkan pengusiran kembali ke negara asal (deportasi). Seperti di Malaysia terdapat sekitar 12.000-25.000[57] jiwa terdaftar oleh UNHCR termasuk jumlah lain yang belum terdaftar. Kedatangan etnis Rohingya di Malaysia dimulai sejak 1990an dan selanjutnya mereka tinggal di Malaysia baik secara legal atau ilegal. Banyak di antara mereka dipekerjakan sebagai buruh atau pekerja kasar lainnya dan tidak jarang menjadi target dari kegiatan razia penertiban terhadap migran ilegal oleh RELA meskipun kenyataannya mereka mendapatkan semacam izin tinggal sementara (IMM 13)[58]. Di Thailand diperkirakan pada 2006-2007 telah mencapai sekitar 7.500 orang mendarat di selatan Thailand[59]. Di Bangladesh, sebagai negara terdekat dengan wilayah Arakan sekaligus negara penerima pelarian etnis Rohingya terbanyak, tercatat bahwa kedatangan pertama pelarian etnis Rohingya di Bangladesh terjadi pada 1948, arus pelarian terbesar terjadi pada 1991-1992 yaitu sekitar 250.000 jiwa meninggalkan Myanmar akibat dari semakin meningkatnya tindak represif pemerintah.

Jumlah tersebut kemudian ditempatkan di tempat pengungsian di Cox's Bazaar, sampai pada Mei 2007 terdapat sekitar 26.317 ditampung di kamp pengungsian tersebut dan telah tinggal selama lebih dari 16 tahun tanpa kebebasan bergerak, terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Bangladesh juga memperkirakan terdapat sekitar 100.000-200.000 orang Rohingya lari ke kamp pengungsian tersebut namun statusnya dianggap ilegal karena tidak terdaftar dalam jumlah pengungsi.

Keputusan pemerintah Bangladesh untuk tidak bersedia mengakui keberadaan tambahan pengungsi dari etnis Rohingya didasarkan pada alasan bahwa Bangladesh sendiri termasuk dalam negara berkembang di mana mayoritas rakyatnya berada dalam kelompok miskin dan tingginya angka buta huruf, jumlah penduduk relatif

[57] Mizzima News (31 Jan 07) UNHCR concern over arrest of Burmese in Malaysia
[58] Refugees International (19 Dec 08) Rohingya: Burma's forgotten minority
[59] Asia News (15 Jan 09) Thailand persecutes Muslim minority

Digital Repository Universitas Jember

besar yaitu terpadat ke-7 dunia dan pemerintah juga tidak mampu memberikan akses kesehatan dan pendidikan cukup terhadap warganya sendiri[60]. Bangladesh juga belum menandatangani konvensi PBB 1951 tentang pengungsi termasuk kekhawatiran akan meningkatnya jumlah pelarian etnis Rohingya ke Bangladesh sehingga jelas sudah mengapa akhirnya Bangladesh memilih untuk tidak mengakui keberadaan tambahan pelarian etnis Rohingya terbaru.

Tabel 4. Data Tentang Jumlah Populasi Etnis Rohingya di Luar Negeri (terhitung sejak Mei 2007)

N	Negara	Jumlah
1.	Saudi Arabia	500.000
2.	Pakistan	200.000
3.	Bangladesh	200.000
4.	Uni Emirat Arab	50.000
5.	Malaysia	25.000
6.	Thailand	20.000

Sumber: Artikel *EBO Briefing Paper* no.2 2009 Rohingya: Bengali Muslim or Rohingya Arakan

Tabel 5. Populasi Etnis Rohingya di Wilayah Arakan (Myanmar)

N	Tahun	Populasi	Keterangan
1.	Sebelum 1962	Lebih dari 2.000.000	Terjadi tindak diskriminasi namun tidak mengarah pada tindakan fisik
2.	Setelah 1962	Sekitar 800.000	Terjadi tindak diskriminasi disertai serangan fisik seperti pengejaran, pengrusakan tempat tinggal dll

Sumber : Artikel *EBO Briefing Paper* no.2 2009 Rohingya: Bengali Muslim or Rohingya Arakan

[60] Informasi ini didapat dari jurnal : *Bangladesh: Analisis of Gaps in the Protection of Rohingya Refugees May* 2007, diproduksi oleh UNHCR

Digital Repository Universitas Jember

Dipilihnya tahun 1962, karena pada masa inilah kelompok militer berkuasa melalui kudeta yang kemudian tindak diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah mengarah pada tindakan fisik seperti pemukulan, kerja paksa, pengusiran, pengrusakan tempat tinggal dll.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS ROHINGYA

Praktek diskriminasi yang dilaksanakan pemerintah junta Myanmar menghasilkan suatu kondisi sulit bagi etnis Rohingya. Bagaimana tidak, praktek diskriminasi tersebut meliputi beberapa bidang kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama tepatnya sejak tahun 1962[61] pada saat militer mengambil alih kekuasaan atas pemerintah melalui kudeta. Dalam bab ini disebutkan sekaligus dijelaskan tentang beberapa bentuk dari tindakan diskriminasi pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.

3.1 Bentuk Diskriminasi Terhadap Etnis Rohingya

Membahas tentang bentuk diskriminasi terhadap etnis Rohingya, maka perlu di sini mengetahui latar belakang kemunculan siapa pihak yang melaksanakan praktek diskriminasi tersebut, dalam hal ini kelompok militer. Kemunculan kelompok militer dalam pemerintahan Myanmar tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Jenderal Ne Win yang pada awalnya hanya diminta untuk membantu pemerintah di bawah Perdana Menteri U Nu, di mana saat itu di Myanmar sedang terjadi kekacauan politik dan keamanan. Salah satu penyebab kekacauan tersebut adalah adanya kebijakan guna mencanangkan agama Buddha sebagai agama nasional. Kebijakan ini menyebabkan protes massal dari rakyat dan berhasil menyita sebagian besar konsentrasi pemerintah.

Keadaan rumit seperti ini membuat pemerintah saat itu rawan bagi terjadinya kudeta terutama dilakukan oleh kelompok militer karena kedudukan dan kemampuan mereka memang cukup memungkinkan guna merebut kekuasaan atas pemerintahan. Terjadinya pergolakan yang berkelanjutan sehingga menyebabkan tidak stabilnya keadaan politik keamanan dalam negeri menjadi faktor utama pendorong pengambilalihan kendali pemerintah oleh militer melalui kudeta.

[61] http://ipsnews.net/news.asp?idnews=45926SOUTH-EAST ASIA diakses pada 08 April 2009

Digital Repository Universitas Jember

Di bawah Jenderal Ne Win, kelompok militer akhirnya berhasil mengendalikan pemerintahan. Jenderal Ne Win kemudian mengesampingkan konstitusi dasar negara yang mengatur tentang pembentukan pemerintah parlementer, sehingga menjadikannya sebagai kepala negara dan mendirikan suatu kediktatoran. Pemerintah dijalankan dengan cara diktator *Tat Madaw* (Angkatan Bersenjata Myanmar), di mana pemerintah berhak melakukan apapun yang mereka anggap benar untuk kepentingan rezim berkuasa. Pemakaian kekerasan menjadi hal wajar bagi junta untuk menekan suatu gerakan baik itu oleh kelompok pro-demokrasi atau etnis minoritas di mana menurut mereka keberadaannya akan menghambat atau membahayakan kekuasaan kelompok militer. Sosialisme ala Myanmar yang diterapkan pemerintah militer, dijalankan dengan sangat mengutamakan kekuatan agar "kestabilan" dan "keamanan" dapat tercapai. Akibatnya adalah terjadi kasus-kasus kekerasan, penahanan, penyerangan kepada pihak-pihak yang menurut pemerintah mengancam "keamanan dan kestabilan" negara. Sosialisme Myanmar merupakan gabungan dari ajaran Buddha, Isolasi internasional dan kontrol negara atas bidang sosial, politik dan ekonomi. Semua keputusan politik terpusat di pemerintah militer. Prinsip-prinsip itu kemudian bermuara pada tindakan diskriminasi oleh pemerintah di mana tindakan diskriminasi tersebut tidak jarang disertai juga dengan tindak kekerasan fisik, pengusiran, praktek kerja paksa, penahanan tanpa alasan jelas atau alasan yang tidak masuk akal termasuk kesengajaan pemerintah mengabaikan tanggung jawabnya untuk melindungi warga sipil.

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, diskriminasi diartikan sebagai suatu bentuk pemilihan, pembedaan berdasar ras, wana kulit atau keturunan ethnik yang memiliki tujuan atau dampak terhadap pengurangan atau penghapusan pengakuan keberadaan suatu etnis, dan suatu etnis diperlakukan secara tidak sama (*unequal)* di bidang politik, sosial, budaya atau bidang kehidupan lainnya. Tindakan diskriminasi itu sendiri tidak hanya didasarkan pada ciri fisik-biologis saja, tetapi telah mengarah pada bentuk penghilangan identitas suatu etnis bahkan kepada

Digital Repository Universitas Jember

bentuk-bentuk penolakan pengakuan atau pengurangan populasi suatu etnis[62]. Praktek diskriminasi dialami oleh etnis Rohingya akibat dari kekejaman pemerintah militer Myanmar yang telah berlangsung dalam jangka waktu relatif lama, bahkan terdapat informasi yang menyebutkan bahwa tindakan diskriminasi tersebut terjadi sejak masa awal kemerdekaan Myanmar dari penjajahan Inggris. Tepatnya pada saat bangsa Burma merayakan kemerdekaan pada tahun 1948, etnis Rohingya justru seakan dikucilkan dari kegembiraan itu**.** Hal ini ditandai dengan penyatuan Burma yang ditandatangani pada 12 September 1947 di Panglong, negara bagian Shan antara Jenderal Aung San (Ayah tokoh pro demokrasi Aung San Su Kyi) dan perwakilan dari berbagai etnis di Burma untuk bersama-sama merebut kemerdekaan dari Inggris dan kemudian membentuk negara federal Burma yang terdiri dari negara-negara bagian sesuai dengan komposisi etnis dan dengan hak untuk menggabungkan diri setelah 10 tahun. Etnis Rohingya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses ini[63], berbeda dengan etnis lain yang berhak mendirikan negara bagian sendiri, etnis Rohingya seakan kehilangan haknya, bahkan wilayahnya (Arakan) diserahkan kepada etnis Rakhine yang beragama Buddha. Sejak saat itulah hak-hak etnis Rohingya berusaha dihilangkan oleh para politisi Buddha Burma. Keadaan semakin menyulitkan bagi etnis Rohingya setelah kelompok militer berhasil menguasai pemerintahan, bukan saja hak-hak politis yang dikekang, tetapi juga dalam bidang sosial, budaya, ekonomi. Hal ini ditandai dengan ditutupnya tempat-tempat belajar bahasa Rohingya pada tahun 1965 oleh junta.

3.1.1 Diskriminasi di Bidang Politik

Diskriminasi di bidang politik diartikan sebagai suatu fenomena yang dialami oleh anggota masyarakat berupa upaya pembatasan secara sistematis terhadap akses untuk mendapatkan hak-hak politiknya oleh pemerintah atau kelompok

[62] Priyambudi Sulistyanto, Politik, Reformasi Ekonomi dan Demokrasi : Studi Perbandingan Thailand, Indonesia, Birma, Prisma no.5 XXVI Mei-Juni1997, hlm.20
[63]http://ji-indonesia.com/pipermail/an-nur ji - indonesia.com/attachments/20090226/36021b4b/attachment.html

Digital Repository Universitas Jember

dominan[64]. Ada beberapa indikator untuk mengetahui apakah praktek diskriminasi di bidang politik telah terjadi, indikator tersebut adalah:

1.) Akses terhadap posisi-posisi politik baik nasional atau regional;

2.) Akses terhadap pelayanan publik;

3.) Kesempatan untuk dapat diterima di rekrutmen militer atau kepolisian;

4.) Hak menyampaikan suara (voting);

5.) Hak untuk mendapatkan kesamaan perlindungan hukum;

6.) Hak untuk membentuk organisasi/kelompok politik.

Dari ke-enam indikator tersebut, jika diterapkan dalam kasus diskriminasi etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar maka didapatkan fakta bahwa keberadaan etnis Rohingya di negara bagian Arakan Myanmar, mendapat akses terhadap posisi-posisi politik baik nasional atau regional yang rendah, seperti pernah terjadi pada Mei 2006, junta (SPDC) menunda-nunda dikeluarkannya izin peringatan ke-15 dewan urusan agama Islam setempat (IRAC) dan peringatan ke-16 perwakilan agama Islam di Myitkina, Negara bagian Chin. Pemerintah kemudian meminta agar pertemuan tersebut ditunda[65]. Upaya diskriminatif tersebut dan upaya diskriminatif lainnya berakar dari keengganan pemerintah Myanmar untuk memberi status warga negara sah kepada etnis Rohingya. Penolakan tersebut berdampak pula pada akses terhadap pelayanan publik seperti kesehatan atau pendidikan di mana pemerintah secara sengaja memberikan berbagai macam hambatan untuk mempersulit warga dari etnis Rohingya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hak menyampaikan suara dan kesamaan hak perlindungan hukum yang rendah, dalam beberapa kasus yang melibatkan warga dari etnis Rohingya sebagai korban seperti kasus pemerkosaan oleh pasukan *NaSaKa* (*Nay-Sat Kut-kwey Ye*), meskipun kasus telah dilaporkan tetapi respon aparat terhadap kasus sangat lambat bahkan aparat

---

[64] Ted Robert Gurr, Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts, UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE PRESS, Washington, D.C, hlm.40

[65] 118 *Burma Country Report on Human Rights Practices-2006,* Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State, 6 Maret 2007

Digital Repository Universitas Jember

sengaja mengabaikannya. Berikut dijelaskan secara rinci bentuk-bentuk diskriminasi di bidang politik yang dialami oleh etnis Rohingya.

1. Penolakan pemberian status kewarganegaraan

Penolakan pemerintah untuk mengakui etnis Rohingya sebagai penduduk asli Myanmar menjadikan etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless)* walaupun mereka merupakan penduduk asli Arakan. Selama ini pemerintah junta hanya bersedia mengakui mereka sebagai Muslim Bengali bukan warga etnis Rohingya selain karena etnis Rohingya tidak termasuk dalam daftar etnis yang diakui pemerintah, tetapi juga disebabkan adanya anggapan dari pihak junta bahwa istilah Rohingya adalah lambang perlawanan terhadap pemerintah dari umat Muslim di Arakan yaitu gabungan dari orang-orang keturunan Bengali, Persia, Mongol, Turki, Melayu, Arab yang menjadikan istilah Rohingya sebagai identitas kolektif mereka. Hal ini menyebabkan Junta memiliki pembenaran untuk mengusir etnis Rohingya dari tanah leluhurnya, akibatnya lebih dari setengah populasi etnis Rohingya diusir dari Arakan. Kebanyakan saat ini hidup di pengungsian di Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Arab Saudi termasuk Indonesia.

Efek lainnya adalah perubahan demografis penduduk Arakan, populasi orang Rohingya berkurang, sedangkan sisanya adalah orang Buddha Rakhine dan orang Buddha dari luar Arakan yang sengaja ditempatkan di Arakan agar dapat mendesak orang-orang Rohingya dan meninggalkan tempat tinggal mereka sehingga akhirnya orang Buddha Rakhine menguasai wilayah Arakan. Pemerintah militerpun secara sengaja "membekali" orang-orang dari etnis Buddha Rakhine dengan persenjataan lengkap agar suatu waktu dapat melaksanakan penyerangan terhadap orang-orang dari etnis Rohingya

2. Pembatasan untuk berpindah/bergerak

Etnis Rohingya yang tersisa di Myanmar saat ini menghadapi masalah sangat pelik, berupa larangan berpergian bagi mereka dari satu desa ke desa lain. Untuk pergi keluar desa mereka harus mendapat izin dari otoritas lokal, yang tentu

Digital Repository Universitas Jember

saja sangat sulit untuk dilakukan. Peraturan itu didasarkan dari kebijakan Kementrian pembangunan wilayah perbatasan dan ras nasional. Selain itu etnis Rohingya di Arakan utara telah dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi yang tidak memungkinkan mereka untuk berpergian dan menjadikan mereka sebagai pekerja paksa. Akibat lanjut dari pembatasan ini adalah kondisi warga etnis Rohingya sangat memprihatinkan, buruknya kondisi kesehatan karena seorang warga harus menempuh jarak cukup jauh dan harus memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat melintasi perbatasan antar desa termasuk ancaman krisis persediaan bahan pangan. Contoh tindakan pembatasan bergerak yang diterapkan seperti pada 2 Juli 2006 *NaSaKa* menangkap 17 warga Rohingya yang masuk di Bazaar Fokira, kota Maungdaw karena mereka terbukti tidak membawa izin berupa dokumen travel. Sebagai hukumannya mereka dipaksa bekerja pada proyek pembangunan jalan raya antara Aung Zu sampai Khamaung Zeik[66].

3. Pembunuhan, penahanan dan penyiksaan.

Pihak Junta telah melakukan kekejaman lainnya yaitu berupa pembunuhan etnis Rohingya, bahkan hal ini dilakukan secara acak dalam rangka pemusnahan etnis Rohingya. Selain itu penyiksaan dan penahanan secara ilegal dilakukan setiap hari di Arakan, ratusan etnis Rohingya hilang dan tidak diketahui nasibnya tiap tahun. Saat ini Arakan telah menjadi ladang pembantaian etnis Rohingya. Seperti yang terjadi pada 26 Juni 2006, sebuah perahu mengangkut 12 warga etnis Rohingya melintasi sungai Raf menuju Bangladesh kemudian ditangkap lalu dibakar, seorang penumpang terbunuh dan sisanya ditahan[67].

4. Kerusuhan anti Rohingya

Pihak junta sengaja memicu kerusuhan di berbagai wilayah Arakan secara periodik dalam rangka melenyapkan etnis ini dari Myanmar, akibatnya ribuan etnis Rohingya tewas secara mengenaskan dan properti mereka juga hancur. Dengan cara

---

[66] "Nasaka forces detainees into construction work", *Kaladan News*, 10 Juli 2006

[67] "Body of Burmese citizen recovered by by Bangladeshi police in Naff River" , *Narinjara News*, 29 Juni 2006

Digital Repository Universitas Jember

ini pihak junta bisa melimpahkan tanggung jawabnya pada warga sipil Buddha Rakhine yang telah dibayar oleh junta untuk membunuhi etnis Rohingya. Seperti pernah terjadi pada saat pemerintah menjalankan program *Nagamin.* Program ini sebenarnya bertujuan untuk meneliti setiap individu yang tinggal di Burma, penandaan sebagai warga negara dan orang asing sesuai hukum di Burma termasuk menindak orang asing yang masuk secara ilegal. Tetapi faktanya program ini juga disertai adanya penyerangan berbuntut kerusuhan yang melibatkan warga etnis Buddha Rakhine[68].

3.1.2 Diskriminasi Bidang Pendidikan

Pembatasan dalam bidang pendidikan, dalam bidang pendidikan hal yang sama juga diterapkan oleh junta. Anak-anak dari etnis Rohingya dilarang masuk ke universitas di Myanmar dan pada saat yang bersamaan juga dilarang melanjutkan pendidikan tinggi keluar Myanmar. Pelarangan ini terkait erat dengan pelarangan berpindah, yaitu pemerintah Myanmar menerapkan pembatasan ekstra ketat sehingga tidak memungkinkan bagi orang-orang dari etnis Rohingya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan lebih baik di kota atau wilayah lain. Dalam peraturan pemerintah Myanmar ditetapkan bahwa jika seseorang dari etnis Rohingya ingin bepergian ke wilayah lain karena berbagai kepentingan termasuk dalam hal ini adalah ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi, maka dia harus membayar sejumlah uang kepada setiap pos penjagaan yang terkadang jumlahnya sangat tidak mungkin untuk dapat dipenuhi (berkisar antara 1.000-1.500 kyatt)[69]. Diskriminasi bidang pendidikan yang dialami etnis Rohingya seperti terjadi pada 270 siswa etnis Rohinya. Mereka ditolak oleh Universitas setempat dengan alasan bahwa siswa tersebut berasal dari warga etnis Rohingya dan keberadaannya tidak diakui sebagai warga resmi

[68] *Benedict Rogers,* opcit hal.43
[69] "Villager Sentenced to Jail for Not Having Village out Pass," *Kaladan News,* 23 September 2006.

Digital Repository Universitas Jember

Myanmar, sedangkan Universitas setempat hanya menerima siswa yang berstatus warga resmi Myanmar[70].

Tabel 6. Kondisi Pendidikan di Wilayah Arakan

n	Variabel	Sekolah dasar (SD)	SMP	SMA
1	Sekolah	2515	136	49
2	Guru	8600	2100	700
3	Murid	264	76	25

Rentang waktu 2002-2003[71]

3.1.3 Diskriminasi Bidang Ekonomi

Diskriminasi di bidang ekonomi dapat dilihat sebagai suatu penghambatan akses untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan, pembatasan profesi hanya untuk etnis-etnis tertentu saja. Terdapat beberapa indikator untuk melihat apakah diskriminasi di bidang ekonomi telah terjadi, indikator tersebut adalah:

1.) Pemerataan hak kepemilikan tanah atau properti lain;

2.) Akses terhadap pendidikan tinggi atau teknik ;

3.) Akses terhadap kegiatan perekonomian;

4.) Kesempatan untuk dapat diterima dalam rekrutmen pekerjaan formal[72].

Dalam kasus diskriminasi etnis Rohingya, maka dapat dijelaskan dengan indikator di atas. Pemerataan hak kepemilikan tanah atau properti lain, jelas sekali pemerintah sangat membatasi kesempatan warga dari etnis Rohingya untuk memiliki lahan atau kepemilikan lainnya. Kebijakan yang ada juga sangat memungkinkan bagi terciptanya penguasaan pemerintah secara menyeluruh atas lahan, kebijakan itu seperti *Tenancy Act 1963*, yang membatalkan hak milik atas tanah, *Settlement & land Record Department* (SLRD) di bawah kementrian pertanian dan irigasi, menyatakan bahwa negara yang menguasai lahan pertanian. Pemerintah juga sering melaksanakan kebijakan pengerusakan tempat tinggal atau pencaplokan tanah tanpa diikuti ganti

[70] "SPDC Authorities Deceive Rohingya Students", *Kaladan News*, 18 Januari 2006
[71] http://en.wikipedia.org/wiki/Rakhine_state
[72] *Ted Robert Gurr*, opcit hal. 48

Digital Repository Universitas Jember

rugi terhadap pemiliknya. Seperti pada kasus berikut, 13 Juni 2006, pasukan *NaSaKa* mencaplok lahan pertanian milik warga Rohingya di desa Inn Din, Maungdaw dengan luas sekitar 5 hektar. Pertengahan April 2006, pimpinan *NaSaKa* di Buthidaung memerintahkan agar mengambil alih lahan pertanian dengan luas sekitar 2 hektar. Beberapa desa yang terkena imbas dari kebijakan ini yaitu:

1.) Goat Pi
2.) Kyun Pauk
3.) Kyaung Daung
4.) Tin May
5.) Pan Zy

Pemindahan paksa juga sering dijalankan oleh pemerintah untuk mengusir warga etnis Rohingya dari tempat tinggal mereka dan warga biasanya kurang mendapatkan kesempatan untuk membawa barang-barang berharga mereka akibat waktu yang disediakan kurang mencukupi. Praktek kerja paksa juga berakibat pada terbatasnya kesempatan warga memenuhi kebutuhan keluarga mereka karena warga tidak memiliki cukup waktu untuk bekerja demi kebutuhan mereka sendiri akibat praktek kerja paksa yang berlangsung sekitar 12 jam dalam sehari dan mereka tidak menerima bayaran atas pekerjaan tersebut. Pemerintah juga menguasai semua kegiatan perekonomian dan pemerintah berupaya untuk mempertahankan dominasinya sehingga perputaran uang hanya berada di pemerintah saja.

Pihak Junta menolak memberikan izin usaha bagi etnis Rohingya, sedangkan di sisi lain Junta menerapkan pajak sangat tinggi bagi etnis Rohingya yang mayoritas adalah petani dan nelayan. Akibatnya sebagian besar lahan pertanian, tambak dan properti milik etnis Rohingya saat ini telah disita secara paksa, sebagai konsekuensi karena tidak bisa membayar pajak. Pemerintah juga membatasi jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang dari etnis Rohingya seperti petani, nelayan atau penebang kayu.

Digital Repository Universitas Jember

1. Pengrusakan tempat tinggal

Pemerintah Myanmar telah melaksanakan pengrusakan tempat tinggal dan memaksa relokasi kepada kelompok etnis minoritas termasuk etnis Rohingya. Praktek pengrusakan desa tempat tinggal diikuti pemindahan paksa masih tetap berlangsung sampai sekarang mengakibatkan jumlah warga tanpa tempat tinggal (*displacement person)* semakin meningkat. Praktek lain yang umum dilakukan setelah pelaksanaan pengrusakan desa selain pemindahan paksa yaitu perampasan persediaan pangan dan penghangusan materi lainnya sehingga tidak bisa dimanfaatkan, tindakan ini dijalankan agar dapat mencegah warga etnis Rohingya kembali lagi ke desanya.

Menerima kenyataan seperti ini, para korban hanya bisa dihadapkan pada pilihan sulit yaitu terpaksa harus tinggal di tempat pengungsian dekat perbatasan dengan Bangladesh di mana kondisinya sangat memprihatinkan atau bersembunyi di hutan sambil menanti selesainya tindakan pengrusakan tempat tinggal atau juga pilihan terakhir yaitu meninggalkan Myanmar menuju negara lain dengan harapan mereka akan mendapatkan kehidupan lebih baik. Pada dasarnya tiap-tiap pilihan memiliki akibat cukup sulit, tetapi pilihan terakhirlah dianggap sebagai pilihan "terbaik" menurut mereka meskipun sebenarnya melarikan diri ke luar negeri adalah suatu tindakan dengan risiko cukup besar. Keadaan seperti ini didasarkan pada fakta bahwa banyak orang Rohingya tinggal secara terpisah-pisah di negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Bangladesh atau Arab Saudi tentu dalam jumlah relatif besar. Alasan yang mendorong orang-orang Rohingya meninggalkan negara asal mereka karena mereka sudah merasa putus asa dengan nasib mereka, selain itu upaya mereka untuk membangun kembali desanya sering dihadapkan pada permasalahan bahwa para prajurit pasti akan merusaknya kembali.

2. Praktek kerja paksa

Praktek kerja paksa adalah salah satu masalah cukup rumit di Myanmar dan karenanya banyak orang khususnya dari etnis minoritas termasuk etnis Rohingya merasa terancam keberadaannya. Pemerintah junta terbukti telah menggunakan

Digital Repository Universitas Jember

sekitar 800.000 orang Myanmar sebagai tukang angkut atau buruh dan pekerja lain dengan bayaran sangat rendah atau bahkan tanpa bayaran sepeserpun[73]. Sampai pada awal 1990an, pemerintah junta Myanmar telah memaksa etnis-etnis minoritas untuk bekerja pada proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, bendungan, rel kereta api termasuk barak bagi prajurit. Warga sipil yang menolak pada saat mereka ditunjuk untuk terlibat dalam proyek pembangunan tersebut, maka akan diancam dengan tuntutan beragam, sedangkan bagi mereka yang sudah terlibat dalam praktek kerja paksa akan ditembak di tempat atau pemukulan jika mereka tidak membayarkan pajak sesuai dengan yang telah ditentukan[74] atau bekerja secara lambat. Di utara negara bagian Arakan tempat tinggal bagi etnis Rohingya, praktek kerja paksa mengalami peningkatan pada 2006 dan bentuk dari praktek kerja paksa juga telah berubah disesuaikan dengan cuacanya.

Di musim penghujan penduduk desa setempat dipaksa untuk membiakkan bibit padi demi kebutuhan militer, pembukaan lahan dengan pembabatan hutan, meskipun di saat yang sama penduduk desa juga disibukkan dengan kegiatan penanaman bibit untuk kebutuhan mereka sendiri. Pada musim kemarau, penduduk desa dipaksa untuk melaksanakan kegiatan pembakaran batu bata, pembangunan jalan dan bangunan, pengumpulan kayu dan pemanenan padi. Proyek pembangunan jalan terpusat pelaksanaannya di wilayah Buthidaung dan Maungdaw, jalan tersebut menghubungkan kamp militer dengan kota sehingga dapat mempermudah pergerakan pasukan dan distribusi persediaan logistik. Pembangunan desa percontohan untuk perumahan Buddha juga berlanjut mengakibatkan penduduk setempat harus merelakan kehilangan tanahnya karena dicaplok oleh pemerintah terutama pada musim kemarau. Penderitaan yang dialami bukan hanya sampai di situ, penduduk setempat juga dipaksa untuk menyediakan bahan-bahan bangunan termasuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan tersebut. Berikut adalah beberapa praktek

---

[73] *Burma Slammed Over Forced Labor*, BBC News, 17 Juni 1999

[74] (noting report of civilians who witnessed the junta's murder of laborers who were unable to adequately perform their duties);*A Global Alliance Againts Forced Labour,* Report of the Director General, 93rd Sess, Geneva, Juni 2005,

Digital Repository Universitas Jember

kerja paksa yang pernah dialami warga etnis Rohingya, 8 Januari 2006, sekitar 78 warga etnis Rohingya dipaksa menjadi penjaga sejumlah pos keamanan di bagian utara Arakan setiap malamnya. 16 Februari 2006, Mohammed Ibrahim dan Noor Boshor dari desa Wabag, kota Maungdaw ditangkap oleh patroli *NaSaKa* karena terbukti tidur di pos pengamanan pada saat melaksanakan tugasnya sebagai penjaga malam. Sebagai hukumannya mereka dibawa ke markas besar *NaSaKa* dan dipukuli. Tiga warga Rohingya yaitu Ali Hossain (40 tahun), Mohammad Sayed (35 tahun), Khairul Amin (19 tahun) dipaksa untuk bekerja pada pembangunan pos polisi tanpa dibayar atau diberi makan. Seorang dari mereka pingsan dan lainnya berada dalam kondisi kritis[75].

Sebenarnya Myanmar telah mengesahkan konvensi ILO tentang pencegahan praktek kerja paksa 1930 no.29 pada tahun 1955, tetapi beberapa laporan menunjukkan masih berlanjutnya praktek kerja paksa oleh pemerintah Myanmar. Terkait dengan makin seriusnya praktek kerja paksa di Myanmar, ILO (*International Labour Organisation*) sebagai badan khusus PBB menangani permasalahan tentang pekerja di seluruh dunia, telah menerapkan resolusi artikel 33 untuk kasus penerapan kerja paksa di Myanmar agar dapat memaksa pemerintah setempat mematuhi kewajibannya sesuai yang tertera dalam konvensi tentang pekerja paksa no. 29 tahun 1930. Resolusi tersebut ditujukan untuk mampu memberikan jaminan keamanan pada para korban dari penerapan kerja paksa dan memberikan sanksi pada pemerintah karena telah ditemukan adanya pelanggaran secara besar-besaran dan sistematis terhadap konvensi tentang buruh.

Pada 17 November 2000, setelah memastikan bahwa kebijakan Pemerintah Myanmar menyimpang dari ketentuan konvensi tentang kerja paksa, ILO telah memerintahkan pembentukan suatu badan untuk pembukaan suatu jalan sehingga dapat menerapkan secara penuh resolusi tersebut, terkandung di dalamnya pemberian suatu wewenang pada anggota badan tersebut agar dapat mengenakan sanksi pada

[75] Rohingyas Forced Into Sentry Duty Without A Reason," *Kaladan News*, 8 Januari 2006

Digital Repository Universitas Jember

pemerintah Myanmar. Di saat yang sama, ternyata resolusi terdahulu yang pernah diterapkan di Myanmar tidak memberi kesempatan pada anggota ILO untuk bertindak selain hanya dapat memeriksa kembali hubungan antara Myanmar dengan ILO. Setelah lima tahun berlalu sejak penerapan sanksi ILO pada pemerintah Myanmar, ILO mengambil beberapa langkah agar dapat mengakhiri praktek kerja paksa. Langkah-langkah tersebut adalah :

1.) Membuat suatu kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat menghubungkan secara rutin dengan para petinggi pemerintahan;
2.) Menyusun tujuh kelompok pengamat bertujuan untuk dapat menerapkan konvensi nomor 29 dan melaksanakan penyelidikan terhadap kasus-kasus kekerasan;
3.) Mengembangkan rencana tindakan bersama antara pemerintah Myanmar dengan ILO;
4.) Menerjemahkan peraturan administratif tentang larangan praktek kerja paksa ke dalam enam bahasa etnis lain di Myanmar[76].

Melihat pada semua upaya dijalankan oleh ILO untuk dapat mengakhiri praktek kerja paksa terhadap etnis minoritas di Myanmar termasuk etnis Rohingya, ternyata dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurang tepatan terkait dengan solusi yang diterapkan, tidak bisa dipertahankan guna mengakhiri praktek kerja paksa. Kesulitan ini disebabkan oleh masih adanya kekebalan hukum dari kelompok militer dan ancaman dari pemerintah terhadap siapa saja yang mengumumkan pada pihak luar bahwa telah terjadi praktek kerja paksa, termasuk juga karena tidak adanya keinginan politik dari pihak militer sekaligus sipil. Kelompok sipil dimaksud di sini adalah para pemimpin desa yang tentunya turut mendapatkan keuntungan dari praktek kerja paksa akibatnya kembali etnis minoritaslah yang menjadi korban dari kekejaman pemerintah setempat.

[76] Havel, V., Tutu, D.M. *opci*t, hal: 22

Digital Repository Universitas Jember

3.1.4 Diskriminasi Bidang Sosial dan Budaya

1. Penghancuran tempat ibadah

Ratusan masjid dan madrasah telah dihancurkan oleh pihak junta, bahkan Al-Qur'an dalam banyak kasus dibakar dan diinjak-injak oleh tentara sedangkan kitab-kitab tentang Islam disita dan dijadikan sebagai bahan pembungkus. Pihak junta juga melarang kaum Muslim melakukan berbagai ibadah, pelarangan untuk membangun masjid baru atau sekedar perawatan terhadap masjid yang sudah ada[77]. Pada awal tahun 2007, warga dari etnis Rohingya mengadakan perbaikan sebuah bangunan masjid yang rusak akibat terjangan badai, tetapi setelah proyek perbaikan selesai tidak lama kemudian pasukan dari pemerintah merusaknya[78].

Tabel 7. Contoh Peristiwa Penghancuran Tempat Ibadah Etnis Rohingya

n	Lokasi	Obyek pengrusakan & jumlahnya
1	Desa Thabray Taw	2 masjid, 1 madrasah, 5 moqtab, 1 hafez khana
2	Desa Leik	5 masjid, 1 madrasah
3	Desa Thinga Net	1 masjid, 1 madrasah, 1 moqtab, 1 hafez khana
4	Desa Pyein Taw (Pryin Daung	1 masjid, 1 madrasah, 1 moqtab, 1hafez khana
5	Desa Shweip Pyin	1 masjid, 2 moqtab
6	Desa Atet Nan Yar	1 masjid, 2 moqtab
7	Desa Auk Nan Yar	1 masjid, 5 moqtab
8	Desa Sin Oo Pyin	1 masjid, 2 moqtab

Sumber: *Kaladan News*, 26 Agustus 2006

Penahanan terhadap anggota takmir masjid juga terjadi, tepatnya pada Agustus 2006, 10 anggota takmir dari lima masjid ditahan di kepolisian Buthidaung. Alasan penangkapan tersebut adalah bahwa pembangunan masjid-masjid tadi ilegal tanpa disertai persetujuan dari pemerintah. Pembatasan untuk menjalankan ajaran

[77] *Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom- 2007*, US Commission on International religious Freedom, Mei 2007

[78] *International Religious Freedom Report 2007: Burma*, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State, 14 September 2007.

Digital Repository Universitas Jember

Islam atau tradisi Islam juga terjadi, seperti perayaan hari besar keagamaan. Pada tahun 2007 banyak warga Muslim di wilayah Arakan tidak bisa merayakan hari raya Idul Adha akibat dari tingginya harga hewan kurban sehingga tidak terjangkau oleh warga dari etnis Rohingya. Kenaikan harga hewan kurban tersebut disebabkan oleh peraturan SPDC yang hanya membatasi pasar hewan ternak hanya di Maungdaw, setiap warga etnis Rohingya juga dipaksa untuk membayar 1.000 kyatt pada saat mereka membeli hewan ternak sebagai bentuk "kontribusi sukarela" terhadap kesejahteraan bersama[79].

2. Pembatasan hak untuk menikah

Pemerintah mengharuskan setiap warga dari etnis Rohingya mengajukan semacam permohonan kepada pemerintah agar diberi izin untuk menikah. Tetapi kenyataannya pemberian perizinan oleh pemerintah sangat sulit didapatkan, karena pemerintah secara sengaja membatasi hanya tiga kali pernikahan tiap tahunnya setiap desa dengan harus mendapatkan pengesahan dari pemimpin militer regional[80]. Sejak tahun 2007 terdapat laporan dari *NaSaKa* yang menunjukkan bahwa pemerintah meminta bayaran antara 10.000-150.000 kyatt untuk dapat mengeluarkan izin melaksanakan upacara pernikahan. Pemerintah juga sering meminta hewan ternak dari warga pemohon izin pernikahan berupa sapi, kambing, ayam atau bebek sebagai persyaratan agar dalam prosesi pernikahannya tidak diganggu oleh pasukan militer *NaSaKa*[81]. Pada saat pelaksanaan upacara pernikahan, kedua mempelai juga diwajibkan menggunakan pakaian khas etnis Burma atau jika perintah tersebut diabaikan maka izin untuk menikah akan dicabut. Meskipun warga telah memenuhi persyaratan tersebut, tidak jarang permohonan pengajuan tersebut sering ditunda pengerjaannya atau secara sengaja pemerintah merumitkan proses pengeluaran perizinan tersebut hingga membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan ada pula

---

[79] "Nasaka Buys Cattle Skins for A Pittance," *Kaladan News*, 16 January 2007; "Rohingya Community

[80] "*Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom-2007"*, US Commission on International religious Freedom, Mei 2007

[81] Army Officials Still Involved in Corruption in Arakan", *Narinjara News,* 12 Juli 2007

Digital Repository Universitas Jember

pasangan yang telah mendapatkan perizinan menikah tetapi pada saat upacara pernikahan dilaksanakan, aparat *NaSaKa* sengaja membubarkannya. Seperti kejadian di distrik Buthidaung 6 Agustus 2006. Upacara pernikahan Sula (28 tahun) dibuyarkan oleh aparat *NaSaKa* dengan menangkap 50 tamu dan memukulinya. Tidak hanya itu, pasangan tersebut lalu ditahan dan baru bisa dibebaskan setelah membayar 30.000 kyatt pada aparat[82].

3. Kejahatan seksual

Beberapa tahun terakhir telah muncul perhatian lebih besar terhadap penyebaran praktek kejahatan seksual ditujukan pada perempuan dilakukan oleh prajurit militer Myanmar, praktek ini diterapkan pada perempuan dari etnis minoritas terutama pada etnis yang selama ini sering mengadakan pergerakan pemberontakan terhadap pemerintah Myanmar. Beberapa laporan telah mendokumentasikan tentang cerita para perempuan Myanmar dari berbagai etnis di mana mereka pernah mengalami kejahatan seksual secara langsung di tahun 2002 dan 2003. Laporan khusus PBB tentang HAM di Myanmar mengajukan laporannya pada komisi khusus HAM terkait kejadian pemerkosaan dan bentuk-bentuk kejahatan seksual lain terhadap perempuan di Myanmar oleh prajurit SPDC secara mendetail[83]. Laporan khusus PBB juga menerima informasi yang cukup kredibel tentang kekerasan seksual pada perempuan dilakukan oleh prajurit pemerintah. Informasi tersebut menunjukkan fakta bahwa praktek pemerkosaan dan berbagai bentuk kejahatan seksual lainnya telah menjadi strategi untuk memperlancar kebijakan "Burmanisasi" karena diharapkan melalui berbagai bentuk tindakan kejahatan seksual tersebut akan lahir generasi baru etnis Burma sekaligus memperbanyak populasi etnis Burma, inilah bukti dari adanya kebijakan pembersihan etnis.

---

[82] "Nasaka Extorts Huge Amounts for Marriage Permits," *Kaladan News*, 28 September 2006; "Wedding Ceremony Raided by Police," *Kaladan News*, 31 August 2006.

[83] UN Economic and Social Council (58 Session), *Situation of Human Right in Myanmar,* A/58/219, 5 Agustus 2003; United Nations Economic and Social Council, Commission on Human Right (58th Session), *Integration of the Human Right of Women and the Gender Perspective Violenceagainst Women,* E/CN 4/2002/83/Add.1 28 Januari 2002

Digital Repository Universitas Jember

Tentara Myanmar secara sengaja menghamili perempuan dari etnis minoritas agar lahirlah "bayi Burma" setelah itu para tentara biasanya memaksa untuk menikahi para perempuan korban pemerkosaan. Sedangkan tujuan lain dari tindak kejahatan tersebut adalah sebagai bentuk serangan fajar. Pemerkosaan adalah senjata untuk menjatuhkan moral dan memperlemah etnis minoritas terutama bagi wilayah-wilayah asal gerakan pemberontakan seperti negara bagian Karen, Shan atau Mon[84]. Sebagai tanggapan terhadap banyaknya bukti tentang kejahatan seksual terhadap perempuan oleh prajurit Myanmar, majelis umum PBB menerapkan resolusi pada tahun 2003 didasarkan pada keprihatinan terhadap kejahatan seksual dilakukan oleh prajurit pemerintah mengakibatkan penderitaan terhadap rakyat khususnya dari etnis minoritas, dan upaya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual.

Tindak pemerkosaan terkadang dikait-kaitkan dengan upaya pemindahan paksa, karena dalam beberapa kasus proses pemindahan paksa kadang dibarengi dengan tindak pemerkosaan. Lebih lanjut, jika tentara menangkap seorang perempuan mencoba kembali ke desa asalnya atau bersembunyi di hutan setelah terjadi pemindahan paksa, perempuan tersebut bisa saja dibunuh. Sebuah laporan menunjukkan hasil dari wawancaranya dengan beberapa perempuan, mengaku bahwa mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena merasa sudah tidak mampu lagi menghadapi kejahatan seperti pemerkosaan oleh tentara[85]. Meskipun mereka telah berada di tempat relokasi, tetapi ini tidak menjamin sepenuhnya bahwa mereka benar-benar aman dari tindak kejahatan seksual oleh tentara karena terdapat beberapa kasus pemerkosaan malah terjadi di tempat relokasi, contohnya seperti pernah terjadi di negara bagian Shan. Kondisi yang turut membuat rentan perempuan etnis minoritas termasuk etnis Rohingya terhadap tindak kejahatan seksual adalah praktek kerja paksa. Pada saat kaum lelaki meninggalkan desa karena ingin melarikan diri dari

---

[84] *Quoting Situation of Human Rights in Myanmar : Report of the Special Rapporteur, Mr Rajsoomer Lallah*, diajukan sebagai penyesuaian dengan resolusi komisi HAM 1997/17,E/CN,4/2000/38, paragraph 50

[85] Havel, V., Tutu. D. M. *opcit,* hal. 24

Digital Repository Universitas Jember

program kerja paksa pemerintah atau harus terlibat dalam praktek kerja paksa, para tentara dapat dengan mudahnya masuk ke desa dan melaksanakan berbagai kejahatan dengan leluasa. Perempuan yang terlibat dalam praktek kerja paksa, juga rawan menjadi korban tindak kejahatan seksual oleh tentara karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan pada saat tentara mengancam akan membunuh mereka sewaktu terjadi perlawanan**.**

Mayoritas para perempuan korban tindak kejahatan seksual tidak melaporkan karena mereka menganggap bahwa tindakan tersebut percuma. Selain itu para korban kekurangan media yang cukup efektif untuk mengadili para pelaku dari tindak kejahatan dimaksud. Selanjutnya adalah kendala bahasa, para korban kesulitan untuk berbicara bahasa Burma dan tidak mengetahui nama atau dari divisi mana pelaku kejahatan. Terakhir, keengganan para korban untuk melaporkan karena para korban harus hidup berdekatan dengan para tentara yang pernah menyerang mereka. Pemerintah militer Myanmar juga melarang utusan khusus PBB untuk HAM di Myanmar agar dapat berkunjung ke wilayah-wilayah dan menyelidiki peristiwa kejahatan seksual dengan menghimpun keterangan dari warga setempat.

Digital Repository Universitas Jember

3.2 Kasus Tindakan Diskriminasi Terhadap Etnis Rohingya

Beberapa kasus terkait dengan tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap etnis Rohingya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Kasus Tindakan Sewenang-wenang Pemerintah Terhadap Etnis Rohingya

No.	Peristiwa
1.	Pemerasan, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dari aparat pemerintah tanpa alasan jelas termasuk perlakuan tahanan di penjara yang tidak baik. Contohnya Azizullah, (30 tahun lelaki) dari Rathidaung meninggal di penjara Akyab diakibatkan tidak menerima perawatan medis, 5 Agustus 2003[86].
2.	2 Februari 2008, *NaSaKa* dari Area 5 menangkap dua lelaki dari desa Kuppagoung karena dituduh melintasi batas antar desa dan terlibat dalam praktek perdagangan manusia. Aparat *NaSaKa*[87] meminta mereka membayar enam juta kyatt untuk meringankan hukuman[88].
3.	4 Februari 2008, *NaSaKa* Area 5 menangkap dua lelaki dari desa Auk Pyoma karena menggunakan telepon genggam, keduanya bisa dilepaskan setelah *NaSaKa* menerima sejumlah uang dari keluarganya. Kasus serupa terjadi pada seorang perempuan yang membawa telepon genggam ditangkap oleh kepolisian Maungdaw dan baru bisa dilepas setelah memenuhi tuntutan dari kepolisian untuk membayar 600.000 kyatt pada petugas[89].
4.	24 Februari 2008, Pengadilan Tinggi Maungdaw menjatuhkan hukuman tahanan penjara pada 12 orang dari desa Thin Baw Gwe selama 7 tahun karena merenovasi masjid tanpa izin[90].
5.	15 Agustus 2008, pihak otoritas SPDC di kota Maungdaw mengumumkan bahwa mereka akan memaksa petani di daerah Maungdaw agar menjual panen padinya kepada SPDC dengan harga 15% di bawah harga pasar[91].
6.	9 Februari 2007, dilaporkan bahwa penduduk desa Dabru Chaung kota Buthidaung dilarang mengunjungi bukit untuk mengumpulkan kayu bakar. Pada 25 Januari dua orang dari etnis Rohingya ditangkap oleh patroli karena mencari kayu bakar di area tersebut. Merekapun dipukuli, dan terpaksa harus membayar 1.500 kyatt untuk bisa melepaskan diri dari hukuman.

[86] Kaladan News 28 April 2008, *Prisoners dies in Akyab jail*
[87] *NaSaKa* adalah pasukan penjaga perbatasan, terdiri dari polisi, intel dan tentara
[88] Kaladan News (06 Feb 08) *Over 80 Rohingyas kept in area detention centre*
[89] Kaladan News (23 Feb 08) *Harassement by police, Nasaka and Sarapa in northern Arakan*
[90] Kaladan News (24 Feb 08) *Harassment by police, Nasaka and Sarapa in northern Arakan*
[91] http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/inc-eco.htm, on 5 Desember 2007

Digital Repository Universitas Jember

7.	13 Juli 2007, Abdur Rahim, 36 didenda oleh aparat karena telah menjual sebanyak 1.300 kg padi pada penduduk desa di Zeditaung kota Buthidaung. Dia diinterograsi oleh tentara tentang bagaimana dia bisa memiliki padi sebanyak itu dan menjualnya tidak ke pemerintah. Kemudian pemerintah mendendanya 17.000 kyatt karena tuduhan menjual padi tidak ke pemerintah.
8.	Pelarangan terhadap orang dari etnis Rohingya untuk membawa beras dari desa tetangga dan harus membeli dari pemerintah tentu dengan harga lebih mahal.
9.	25 Juni 2007, Terkait dengan program kerja paksa pemerintah Myanmar diterapkan pada etnis Rohingya di wilayah Arakan, seorang nelayan dari etnis Rohingya mengaku bahwa dia dipaksa untuk bekerja di ladang milik *NaSaKa* sehingga tidak ada waktu untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya[92]. Pada awalnya *NaSaKa* menjanjikan adanya bagi hasil dalam proyek penggarapan ladang meliputi pembajakan tanah, penyemaian bibit, pemanenan tetapi kemudian *NaSaKa* merubah secara sepihak kesepakatan dengan banyak melaksanakan pemaksaan, tidak membagi hasil keuntungan. Program kerja paksa juga meliputi kegiatan pembabatan hutan untuk membuka lahan, pembangunan jalan raya di mana dalam program kerja paksa pembangunan jalan turut melibatkan anak berusia 12 tahun, termasuk juga keharusan warga untuk membersihkan kamp militer, mengumpulkan kayu bakar
10.	26 Oktober 2006, Seorang warga dari distrik Rathedaung menjadi korban perkosaan aparat *NaSaKa*, korban bersama keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepala *NaSaKa.* Tanggapan dari pihak *NaSaKa* sebenarnya cukup positif tetapi kenyataannya pihak korban diminta untuk menyerahkan sekitar 500.000 kyatt agar kasus dapat diselesaikan dan pelaku dapat diadili. Ironisnya lagi, setelah membayar sejumlah uang untuk menyelesaikan permasalahan, korban perkosaan malah dipaksa untuk menikah dengan aparat *NaSaKa* pelaku tindak perkosaan[93]
11.	24 Februari 2008, Pengadilan Tinggi Maungdaw menjatuhkan hukuman tahanan penjara pada 12 orang dari desa Thin Baw Gwe selama 7 tahun karena merenovasi masjid tanpa izin[94].

[92] Burma Human Rights YearBook 2006, Human Rights Documentation unit of the National Coalition Government of the Union of Burma 25 June 2007, hal. 29
[93] "PWO Condemns Sexual Violence by Burmese Troops against Palaung Women, *Narinjara News*, 26 October 2006, Arakan Project
[94] Kaladan News (24 Feb 08) *Harassment by police, Nasaka and Sarapa in northern Arakan*

Digital Repository Universitas Jember

12.	Diskriminasi bidang pendidikan, sejak tahun 2001 warga etnis Rohingya diwajibkan untuk mendapatkan perizinan jika ingin bepergian ke Sittwe (ibukota Negara bagian Arakan) di mana satu-satunya perguruan tinggi yang terletak di Negara bagian Arakan. Pada Desember 2005, petugas imigrasi di distrik Maungdaw meminta sejumlah uang kepada 270 siswa. Setiap siswa diminta untuk menyerahkan 3.000 kyatt, selain itu terdapat kewajiban agar menyediakan karpet seharga 55.000-60.000 kyatt per empat orangnya. Setelah semua "kewajiban" dipenuhi, para siswa tersebut malah ditolak oleh Universitas setempat dengan alasan bahwa para siswa tadi berasal dari etnis Rohingya dan keberadaannya tidak diakui sebagai warga resmi Myanmar, sedangkan Universitas setempat hanya menerima siswa yang berstatus warga resmi Myanmar[95].
13.	26 Agustus 2006, pasukan *NaSaKa* merusak tempat ibadah etnis Rohingya di kota Rathedaung Negara bagian Arakan. Tercatat 13 masjid, 4 madrasah, 18 moqtab dirusak, 3 pusat pembelajaran Al-Quran (Hafez Khana) dirusak. Mereka beralasan bahwa bangunan-bangunan tersebut adalah ilegal karena tidak disertai dokumen resmi. Berikut adalah bangunan tempat ibadah yang dirusak di kota Rathedaung: 1. Desa Thabray Taw; 2 masjid, 1 madrasah, 5 moqtab, 1 hafez khana; 2. Desa Leik village; 5 masjid, 1 madrasah; 3. Desa Thinga Net; 1 masjid, 1 madrasah, 1 moqtab, 1 hafez khana; 4. Desa Pyein Taw (Pryin Daung); 1 masjid, 1 madrasah, 1 moqtab, 1hafez khana; 5. Desa Shweip Pyin; 1 masjid, 2 moqtab; 6. Desa Atet Nan Yar; 1 masjid, 2 moqtab; 7. Desa Auk Nan Yar; 1 masjid, 5 moqtab; 8. Desa Sin Oo Pyin; 1 masjid, 2 moqtab.[96]

[95] "SPDC Authorities Deceive Rohingya Students, *Kaladan News*, 18 Januari 2006
[96] "Nasaka Destroys Religious Precincts in Arakan State, *Kaladan News*, 26 Agustus 2006.